DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG







2025

PROFIL PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya buku "**Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025**" ini tepat pada waktunya.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas Pendidikan serta Bappeda terkait perencanaan Pendidikan di Kabupaten Tangerang ke depannya. Selain itu, buku profil ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun instansi-instansi terkait lainnya.

Di dalam buku ini ditampilkan antara lain terkait capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang, jumlah satuan pendidikan, jumlah peserta didik, jumlah pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana dan entitas lainnya pada jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Nonformal (PAUD dan Dikmas).

Tangerang, Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Dadan Gandana, S.STP, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Isu-Isu Strategis 2
1.4 Demografi Kabupaten Tangerang 4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN
2.1 Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi 7
2.2 Struktur Organisasi 8
2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 11
2.4 Program Dinas Pendidikan dan Capaian 19
BAB III DATA KEPENDIDIKAN
3.1 Angka Partisipasi 22
3.2 Capaian Literasi Numerasi 28
3.3 Data Pokok Pendidikan Dasar 29
3.4 Data Pokok Pendidikan Nonformal 50
3.5 Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang 5
Gambar 1.2 Persentase Penduduk 6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 9
Gambar 2.2 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 20
Gambar 3.1 Tingkat Partisipasi PAUD Sederajat (APK PAUD) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Tangerang 23
Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang 24
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan 25
Gambar 3.4 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang 26
Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan 27
Gambar 3.6 Capaian Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP 28
Gambar 3.7 Sebaran SD Berdasarkan Status per Kecamatan 30
Gambar 3.8 Sebaran SMP Berdasarkan Status per Kecamatan 31
Gambar 3.9 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi 32
Gambar 3.10 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 33
Gambar 3.11 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 34
Gambar 3.12 Persentase Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 36
Gambar 3.13 Persentase Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin 37
Gambar 3.14 Persentase Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dan Status Satuan Pendidikan 38
Gambar 3.15 Persentase Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian dan Status Satuan Pendidikan 39
Gambar 3.16 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 40
Gambar 3.17 Persentase Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 41
Gambar 3.18 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 41

Gambar 3.19 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 42
Gambar 3.20 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 43
Gambar 3.21 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 44
Gambar 3.22 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis 47
Gambar 3.23 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 49
Gambar 3.24 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 50
Gambar 3.25 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal 52
Gambar 3.26 Sebaran Data PAUD 53
Gambar 3.27 Sebaran Data PKBM 53
Gambar 3.28 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar 54
Gambar 3.29 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 3
Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tangerang 4
Tabel 1.3 Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan 6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 12
Tabel 2.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 13
Tabel 2.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan 14
Tabel 2.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 16
Tabel 2.5 Target SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2030 17
Tabel 2.6 Capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024 18
Tabel 2.7 Uraian Program 21
Tabel 3.1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status 29
Tabel 3.2 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat 33
Tabel 3.3 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 34
Tabel 3.4 Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SD 35
Tabel.3.5 Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP 35
Tabel 3.6 Jumlah Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 36
Tabel 3.7 Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin 37
Tabel 3.8 Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan 37
Tabel 3.9 Jumlah Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian dan Status Satuan Pendidikan 38
Tabel 3.10 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 39
Tabel 3.11 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 40
Tabel 3.12 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 41
Tabel 3.13 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 42

Tabel 3.14 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 43
Tabel 3.15 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 44
Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP 45
Tabel 3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD 45
Tabel 3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP 46
Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis Sarana 46
Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD 47
Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP 47
Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP 48
Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 49
Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 50
Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal 52
Tabel 3.26 Peserta Didik/ Warga Belajar Pendidikan Nonformal 54
Tabel 3.27 Pendidik Pendidikan Nonformal 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki arah kebijakan merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Misi yang diamanatkan adalah Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat menuju Masyarakat yang Religius; dan Meningkatkan Akses Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Buku Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang disusun dalam upaya menjadi acuan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pada buku ini disajikan tentang entitas data yang mendukung terwujudnya program pembangunan pendidikan yaitu satuan pendidikan/ sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), peserta didik dan substansi pendidikan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Harapan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang yaitu mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, situasi, serta isu-isu yang berkembang di lingkungan Dinas Pendidikan. Profil ini berfungsi sebagai dasar dalam memperkuat peran Dinas Pendidikan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang. Selain itu, profil tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya, yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta penguatan manajemen penyelenggaraan pendidikan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan dilematis dalam proses pembangunan yang menimbulkan celah atau *gap expectation* antara hasil capaian kinerja pembangunan dengan kondisi yang diharapkan dalam periode perencanaan. Kesenjangan yang ditimbulkan merupakan dampak dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Mencermati kondisi capaian kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, beberapa dimensi pembangunan menunjukan hasil

capaian kinerja yang cukup baik, namun beberapa aspek pembangunan lainnya masih menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan upaya pembangunan yang lebih terarah dan terpadu secara berkelanjutan. Adapun permasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dewasa ini sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	1. Masih kurangnya kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal 2. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah 3. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya Pendidikan 4. Belum tersedianya kebijakan daerah yang terbarukan	Distribusi dan kualitas guru belum merata
2	Belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik	1. Menurunnya karakter siswa dalam hal spiritual, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi dan kebhinekaan global 2. Masih terjadi perundungan, kekerasan dan penyalahgunaan narkotika di Satuan Pendidikan	Belum optimalnya karakter peserta didik
3	Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat	1. Minat baca masyarakat yang masih rendah 2. Kurangnya akses masyarakat terhadap buku fisik/digital	Masih Rendahnya Capaian Literasi dan Numerasi

No	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
4	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal	Infrastruktur pendidikan yang tidak merata
5	Belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas	1. Masih terbatasnya akses peserta didik penyandang disabilitas dalam Pendidikan 2. Masih terdapat siswa yang putus sekolah	Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah

1.4 Demografi Kabupaten Tangerang

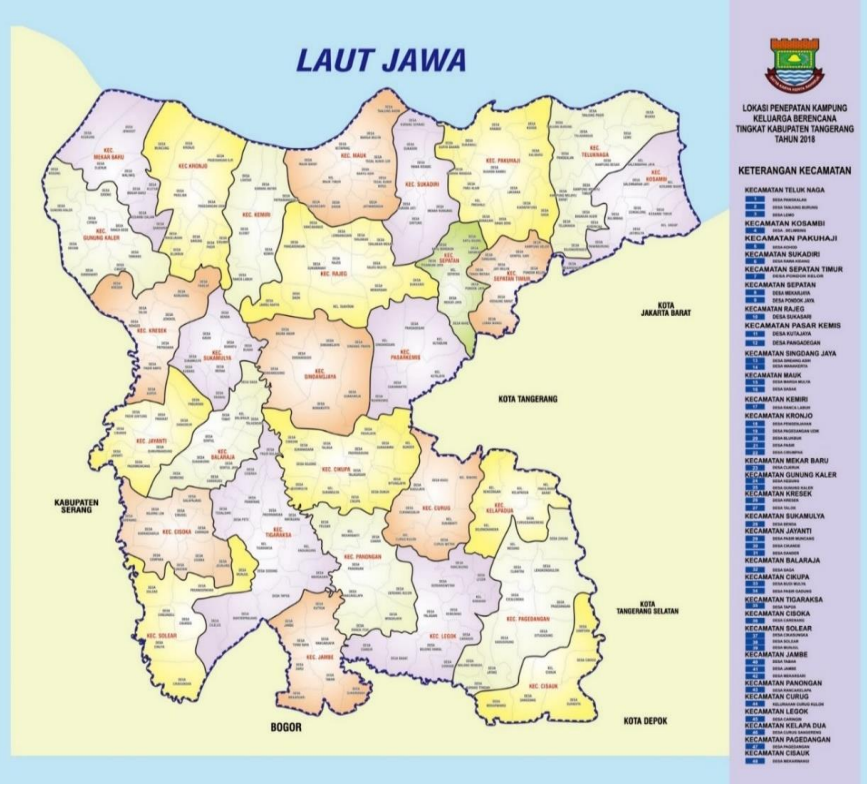
a. Peta Wilayah

Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ibu kota kabupaten adalah Tigaraksa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km^2 yang terdiri atas 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa. Wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan wilayah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang. Berikut daftar 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tangerang

No.	Kode Wilayah	Nama kecamatan
1	36.03.01	BALARAJA
2	36.03.18	CIKUPA
3	36.03.23	CISAUK
4	36.03.05	CISOKA
5	36.03.17	CURUG
6	36.03.32	GUNUNG KALER
7	36.03.04	JAMBE
8	36.03.02	JAYANTI
9	36.03.28	KELAPA DUA
10	36.03.09	KEMIRI
11	36.03.14	KOSAMBI

No.	Kode Wilayah	Nama kecamatan
12	36.03.06	KRESEK
13	36.03.07	KRONJO
14	36.03.20	LEGOK
15	36.03.08	MAUK
16	36.03.33	MEKAR BARU
17	36.03.22	PAGEDANGAN
18	36.03.15	PAKUHAJI
19	36.03.19	PANONGAN
20	36.03.12	PASAR KEMIS
21	36.03.11	RAJEG
22	36.03.16	SEPATAN
23	36.03.30	SEPATAN TIMUR
24	36.03.29	SINDANG JAYA
25	36.03.31	SOLEAR
26	36.03.10	SUKADIRI
27	36.03.27	SUKAMULYA
28	36.03.13	TELUKNAGA
29	36.03.03	TIGARAKSA



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang

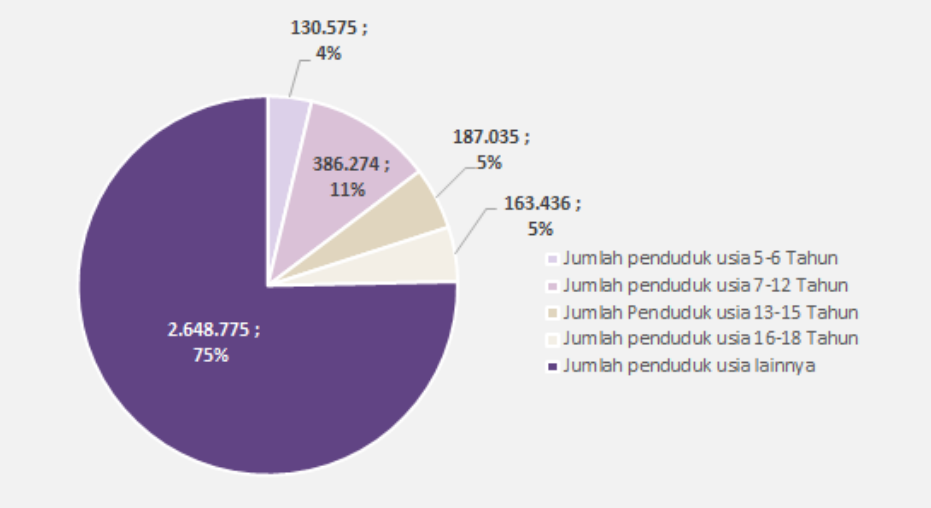
b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.516.095 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk usia sekolah 5 sampai 18 tahun 867.320 jiwa.

Tabel 1.3

Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun	67.877	62.698	130.575
2	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	200.426	185.848	386.274
3	Jumlah Penduduk usia 13-15 Tahun	96.835	90.200	187.035
4	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	83.664	79.772	163.436
5	Jumlah penduduk usia lainnya			2.648.775
Jumlah penduduk seluruhnya				3.516.095



Gambar 1.2 Persentase Penduduk

(**Sumber Data**: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2025 semester 1)

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

2.1 Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang Pendidikan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Pendidikan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program kerja DISDIK;
b. mengoordinasikan dengan instansi/lembaga lain
c. terkait di bidang pendidikan; membina pegawai di lingkungan DISDIK untuk meningkatkan kinerja pengawai;
d. mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, menga'i/asi, memantau dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
f. pelayanan umum di bidang pendidikan; mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;

g. melaporkan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di bidang Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

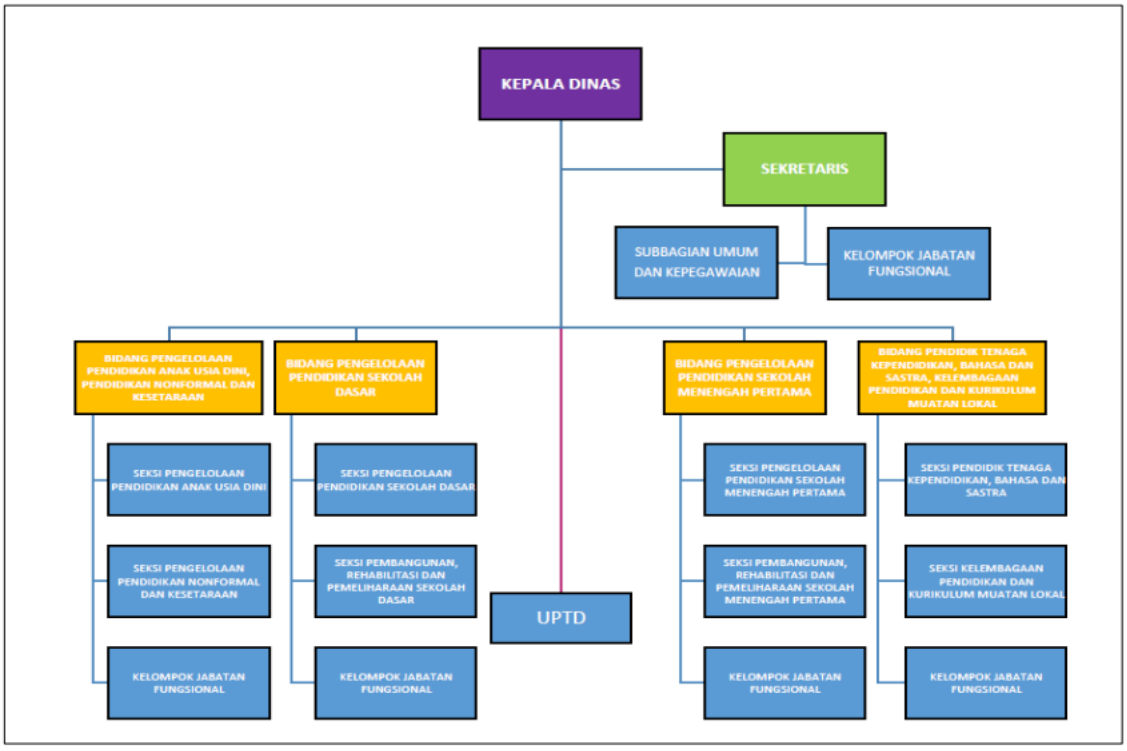
2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membentuk lembaga pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
    a. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
    b. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    a. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    b. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Dasar; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    a. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
    b. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra;
b. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPTD



Sumber : Data Dinas Pendidikan, 2024

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretariat

   Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan mengendalikan tugas kesekretariatan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan

Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal.

4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

   Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar.

5. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

   Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

6. Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal.

7. UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan. Visi Kabupaten Tangerang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ”

Adapun misi Kabupaten Tangerang dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;

5. Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berperan dalam mendukung misi ke IV, tujuan **Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat**, dan sasaran **Meningkatnya Pelayanan Pendidikan** dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pendidikan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat		Indeks Pendidikan	0.68	0.69	0.69	0.70	0.71	0.72
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9.63	9.88	10.13	10.39	10.66	10.93
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.43	13.63	13.83	14.03	14.24	14.45
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	NILAI SAKIP OPD	80.55	81.55	82.55	83.55	84.55	85.55

Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Pendidikan, yang meliputi antara lain:

Tabel 2.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
2	Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum
3		Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif	Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif
4		Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi	Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi
5		Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan	Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
6		Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
7	Pendidikan menjunjung nilai budaya dan karakter bangsa.	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif
8		Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan	Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Pendidikan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaii berikut:

Tabel 2.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	1. Rasio murid dan guru belum ideal 2. Kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi 3. Masih ada sekolah dasar/smp dengan kondisi gedung kurang layak	Meningkatkan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
2	Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum	Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan		Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum
3		Mendorong pemerataan sarana prasarana			Mendorong pemerataan sarana prasarana

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
		yang menunjang pendidikan inklusif		4. Keterbatasan anggaran pembangunan dan perawatan sarana pendidikan" 5. Masih ada wilayah tanpa lembaga PAUD 6. Keterbatasan tenaga pendidik PAUD yang kompeten 7. Belum seluruh PAUD memenuhi Standar Nasional Pendidikan 8. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan PAUD" 9. Jumlah lembaga PKBM masih sedikit 10. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan 11. Keterbatasan dukungan fasilitas dan SDM pada lembaga non-formal" 12. Masih terbatasnya jumlah guru pendidikan khusus 13. Fasilitas pendidikan belum ramah bagi penyandang disabilitas 14. Kurangnya pelatihan untuk guru dalam layanan	yang menunjang pendidikan inklusif
4		Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan		Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi
5		Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan			Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
6		Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan			Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
7	Pendidikan menjunjung nilai budaya dan karakter bangsa	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif	Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama		Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif
8		Mengintegrasikan nilainilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan			Mengintegrasikan nilainilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	AKAR MASALAH	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
				pendidikan khusus" 15. Belum semua guru menguasai media pembelajaran digital 16. Akses internet dan perangkat TIK belum merata 17. Terbatasnya pelatihan TIK untuk pendidik	

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 2.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kualitas layanan dan akses pendidikan yang inklusif serta merata	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Penguatan kolaborasi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas kompeten	Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan	Optimalisasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata dalam rangka memperkuat daya saing sumber daya manusia

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029

Selain Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Dinas Pendidikan juga memiliki target dan capaian lainnya yaitu SPM bidang Pendidikan. SPM bidang pendidikan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yaitu ketentuan

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik.

SPM pendidikan diatur dalam Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang: Jenis dan penerima pelayanan dasar, Mutu pelayanan dasar, Pencapaian SPM Pendidikan, Pelaporan dan evaluasi.

SPM pendidikan terdiri dari SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sementara itu, jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.5 Target SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2030

Indikator SPM	Target								
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
APS PAUD	100,00	100,00	100,00	68,03	71,07	74,11	77,15	80,19	83,16
APS DASAR	100,00	100,00	100,00	99,23	99,48	99,72	99,97	100,00	100,00
APS KESETARAAN	100,00	100,00	100,00	14,19	14,95	15,72	16,48	17,24	18,01
LITERASI SD	50,71	51,59	56,68	58,67	61,17	63,67	66,17	68,67	71,17
LITERASI SMP	60,22	60,03	66,53	67,95	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45
NUMERASI SD	37,33	39,54	42,79	53,82	56,72	59,62	62,52	65,42	68,32
NUMERASI SMP	53,66	52,97	62,9	62,01	63,51	65,01	66,51	68,01	69,51
PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B	63,61	54,58	56,71	49,06	49,65	50,33	51,07	51,82	52,46
PROPORSI GURU PAUD S1/D4	68,00	55,16	56,71	60,25	61,00	61,75	62,5	63,25	64,00
IKLIM INKLUSIVITAS SD	73,76	76,76	61,16	59,18	61,68	64,18	66,68	69,18	71,68
IKLIM INKLUSIVITAS SMP	72,94	75,94	60,2	57,14	59,54	61,94	64,34	66,74	69,14
IKLIM KEAMANAN SD	81,91	85,31	76,03	73,53	74,43	75,33	76,23	77,13	78,03
IKLIM KEAMANAN SMP	75,96	80,96	71,54	68,2	69,70	71,20	72,20	74,20	75,70
IKLIM KEBHINEKAAN SD	86,23	80,28	72,02	68,7	69,70	70,70	71,70	72,70	73,70
IKLIM KEBHINEKAAN SMP	75,42	77,42	70,07	67,63	68,63	69,63	70,63	71,63	72,63

Tabel 2.6 Capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024

Indikator SPM	2022	2023	2024
APS PAUD	70,21	72,07	64,99
APS DASAR	98,13	98,78	98,99
APS KESETARAAN	0,12	9,7	13,43
LITERASI SD	51,59	58,16	56,17
LITERASI SMP	39,54	63,14	66,85
NUMERASI SD	60,03	45,97	50,92
NUMERASI SMP	52,97	57,41	60,51
PROPORSI SATPEN PAUD AKRE B	54,58	49,02	48,64
PROPORSI GURU PAUD S1/D4	55,16	55,01	55,01
IKLIM INKLUSIVITAS SD	81,91	54,46	56,68
IKLIM INKLUSIVITAS SMP	72,94	53,84	54,74
IKLIM KEAMANAN SD	81,91	72,26	72,63
IKLIM KEAMANAN SMP	75,96	65,07	66,7
IKLIM KEBHINEKAAN SD	86,23	70,7	67,7
IKLIM KEBHINEKAAN SMP	75,42	68,54	66,63

Sumber : Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2024

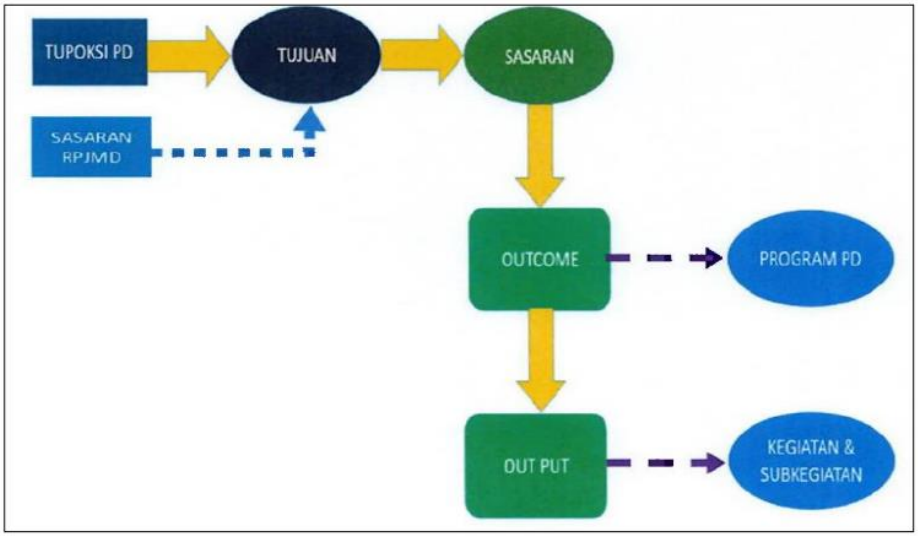
Merujuk terhadap hasil capaian SPM menurut Rapor Pendidikan, partisipasi warga negara pada pendidikan dasar usia 7-15 tahun memiliki nilai capaian tertinggi yaitu 98,99% jika dibandingkan dengan partisipasi pendidikan PAUD dan Kesetaraan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dimana Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi.

Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2018 berfokus kepada partisipasi, ketersediaan dan kualitan barang/jasa, ketersediaan dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Partisipasi siswa, kepemilikan sertifikat pendidik, pelengkapan dasar (buku, modul dan lainnya). Hal itu juga mempengaruhi perubahan transformasi SPM tahun 2021 yang lebih berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik seperti Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, fokus SPM pendidikan bergeser dari sekadar akses dan ketersediaan layanan menuju peningkatan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. Indikator-indikator utama meliputi:

1. Literasi dan Numerasi: Kemampuan dasar siswa dalam membaca dan berhitung;
2. Iklim Keamanan dan Inklusivitas: Lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi semua siswa;
3. Kualitas Pendidik: Kualifikasi dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran.

2.4 Program Dinas Pendidikan dan Capaian

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pendidikan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.



Gambar 2.2 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Pendidikan, yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Berikut adalah uraian Program pada Dinas Pendidikan:

Tabel 2.7 Uraian Program

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar	Persen	98,99	99,23	99,48	99,72	99,97	100,00	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	Persen	64,99	68,03	71,07	74,11	77,15	80,19	83,16	83,16
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Non-formal/Kesetaraan	Persen	13,43	14,19	14,95	15,72	16,48	17,24	18,01	18,01
	Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik	Persen	58,26	62,26	64,26	64,26	66,26	68,26	70,26	70,26
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Persen	27,06	28,06	28,56	28,56	29,06	29,56	30,06	30,06
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	8,55	28,55	43,55	58,55	68,55	78,55	88,55	88,55
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	Persen	89,14	90,64	91,64	92,64	93,64	94,64	95,64	95,64
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui	Persen	80,08	80,58	81,58	82,58	83,58	84,58	85,58	85,58
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan dokumen penunjang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025

BAB III
DATA KEPENDIDIKAN

Profil Data Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2025 bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baik untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (PNF) kondisi data tanggal 30 Oktober 2025. Selain Dapodik, sumber data yang digunakan adalah data Emis (Platform Sistem Pendataan Pendidikan di Kementerian Agama) untuk data peserta didik dan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tangerang. Dalam profil ini juga ditampilkan beberapa indikator capaian, diantaranya angka partisipasi (APK, APM, dan APS) dan Literasi Numerasi dari Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

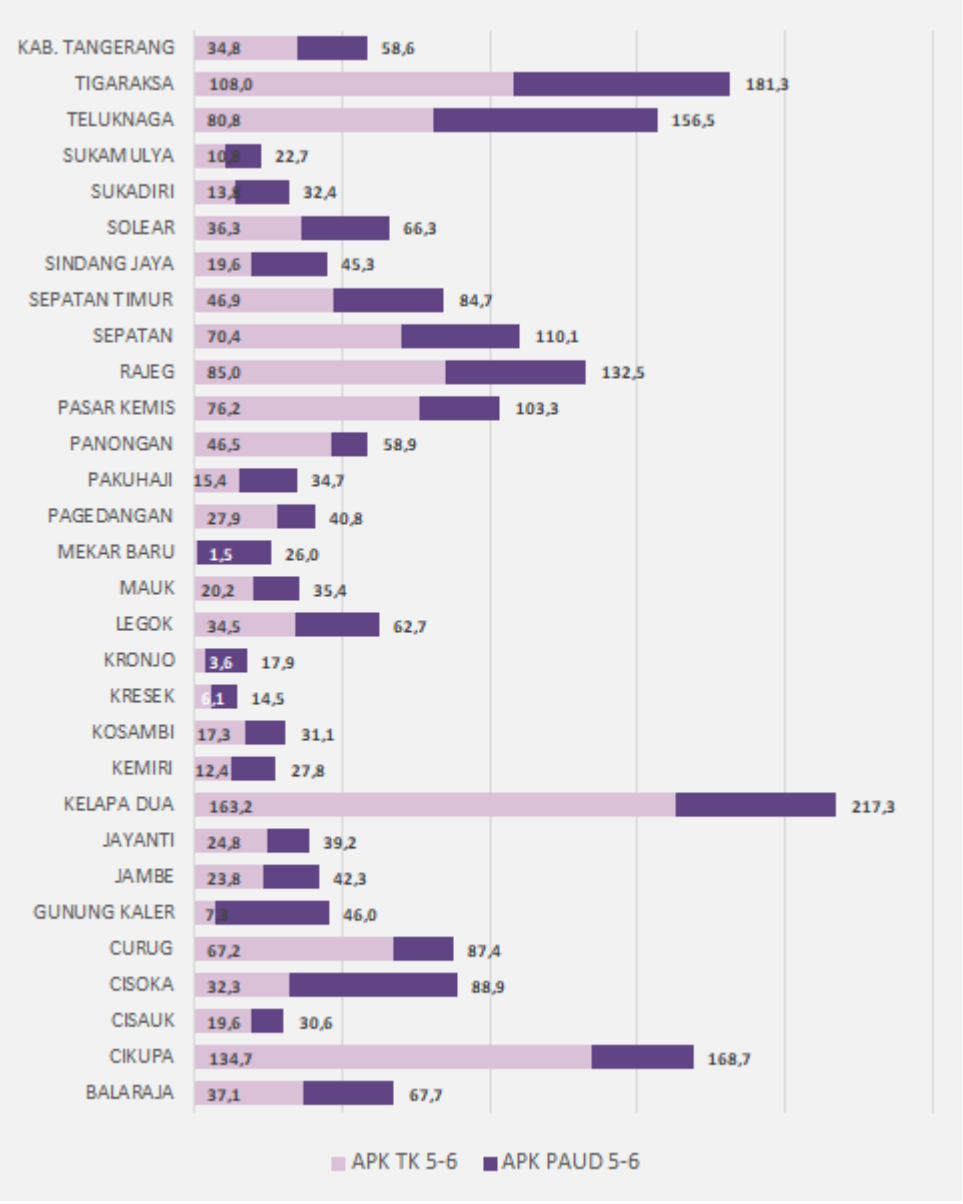
3.1 Angka Partisipasi

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pendidikan. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah ini dapat dimulai dengan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada pada usia sekolah. Selain itu, peningkatan kualitas serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga harus mendapat perhatian serius. Tingkat pemanfaatan fasilitas pendidikan dapat diukur melalui persentase penduduk usia sekolah yang sedang mengikuti kegiatan belajar di satuan pendidikan.

Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain: Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada tiga indikator yang digunakan untuk capaian yaitu Angka

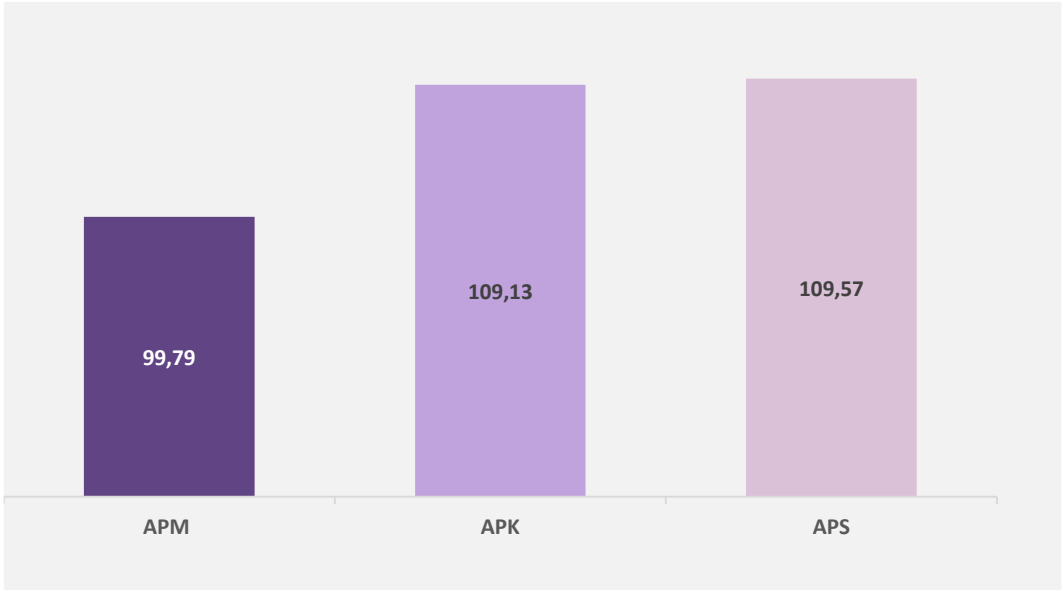
Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Berikut disajikan capaian tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Tangerang untuk PAUD sederajat usia 5-6 tahun, SD sederajat, dan SMP sederajat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PAUD sederajat adalah jumlah peserta didik dari TK/RA, SD sederajat adalah jumlah peserta didik dari SD/MI/Paket A. Sedangkan SMP sederajat adalah jumlah peserta didik dari SMP/MTs/Paket B.



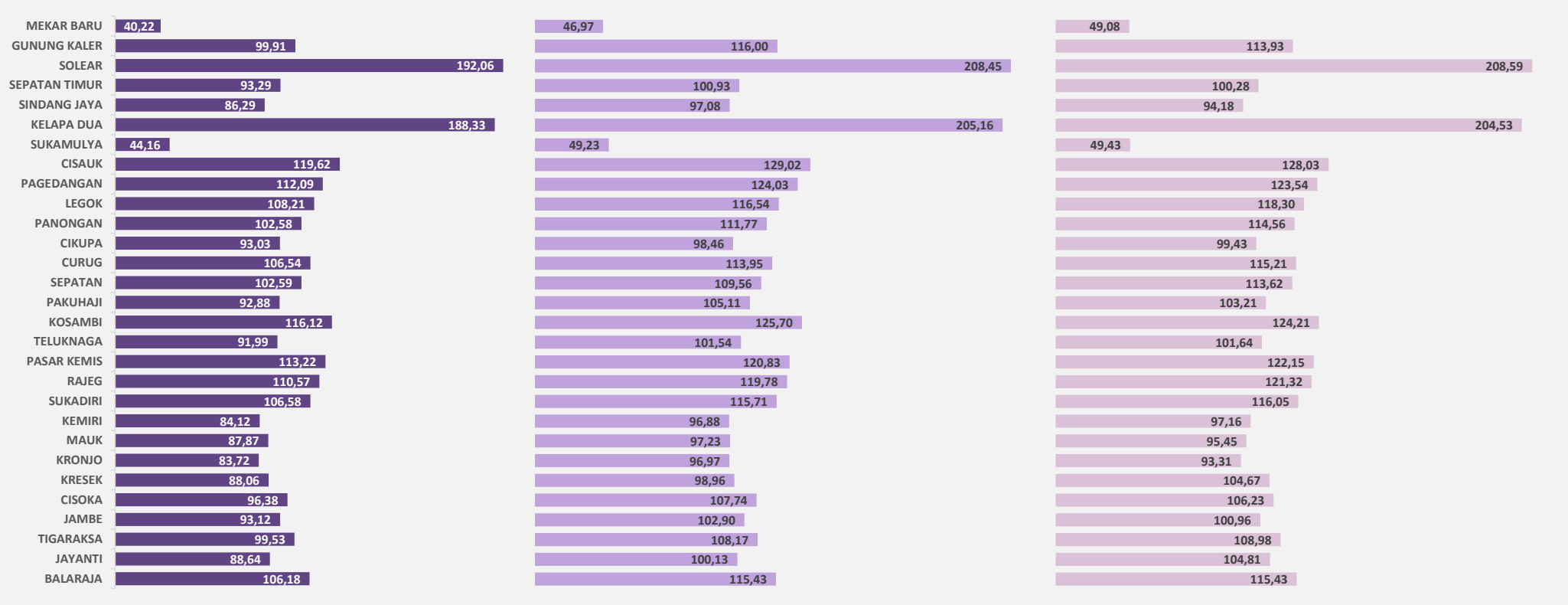
Gambar 3.1 Tingkat Partisipasi PAUD Sederajat (APK PAUD) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Tangerang

Dari Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa APK PAUD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebesar 58,60 persen. Dari angka ini dapat diketahui bahwa masih ada hamper setengah penduduk Tangerang usia 5-6 tahun yang belum bersekolah dalam rangka persiapan pra-SD. Kecamatan yang penduduknya paling banyak bersekolah untuk persiapan pra-SD adalah Kec. Kelapa Dua sebesar 217,3 persen. Capaian APK PAUD di kecamatan tersebut menunjukkan ada banyak peserta didik yang berasal dari luar Kec. Kelapa Dua. Sedangkan paling kecil pada Kec. Kresek sebesar 14,50 persen.



Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang

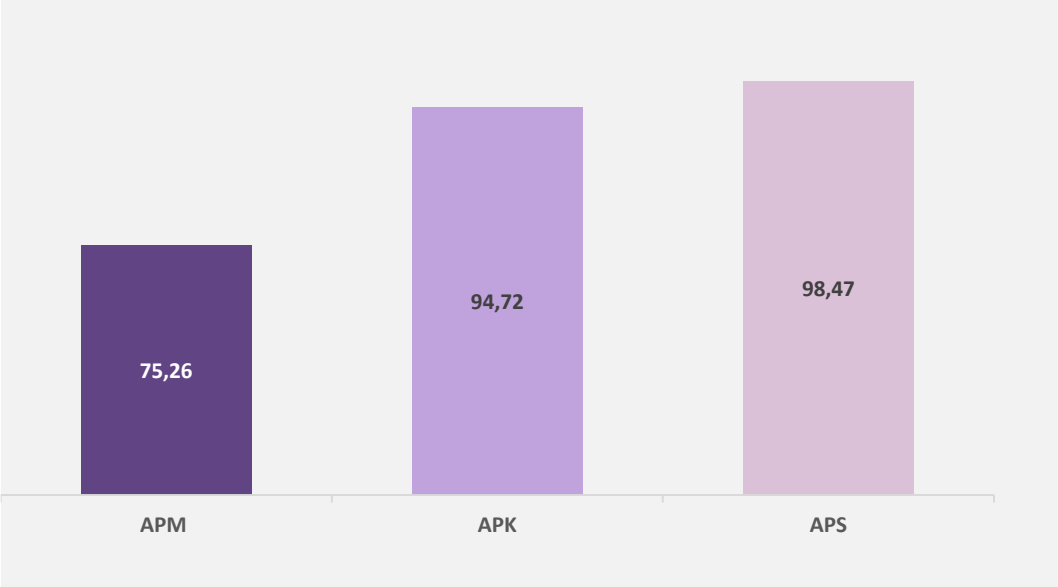
Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa capaian APK dan APS SD sederajat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 melebihi 100 persen sedangkan capaian APMnya sebesar 99,79 persen. Hal ini menunjukkan ada sebagian peserta didik SD sederajat di Kabupaten Tangerang yang bukan penduduk/tidak ber-NIK Kabupaten Tangerang. Berikut rincian capaian ketiga indikator pada masing-masing kecamatan.



(a) APM (b) APK (c) APS

Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan

Dari Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang capaian angka partisipasinya tinggi melebihi 100 persen, ada yang di bawah 100 persen. Kecamatan Kemiri memiliki capaian yang sangat tinggi, hal ini dimungkinkan terdapat warga yang bukan berasal dari Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Kelapa Dua namun bersekolah di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk kecamatan yang capaian angka partisipasinya di bawah 100 persen, dimungkinkan masih ada warga usia sekolah SD yang belum bersekolah atau bersekolah di kecamatan lain. Ada kecamatan yang APMnya kurang dari 100 persen, namun APKnya di atas 100 persen seperti Kecamatan Gunung Kaler dengan APK sebesar 116 persen. Artinya terdapat peserta didik SD sederajat yang di luar usia 7-12 tahun.



Gambar 3.4 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Gambar 3.4 dapat diketahui bahwa capaian APM, APK, dan APS SMP sederajat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 kurang dari 100 persen. Pada indikator APM memiliki capaian terendah yaitu sebesar 75,26 persen. Hal ini menunjukkan ada sebagian peserta didik SMP sederajat di Kabupaten Tangerang yang usianya di luar usia SMP (13-15 tahun) atau sebesar sekitar 25 persen yang usianya di luar 13-15 tahun. Berikut rincian capaian ketiga indikator pada masing-masing kecamatan.



(a) APM (b) APK (c) APS

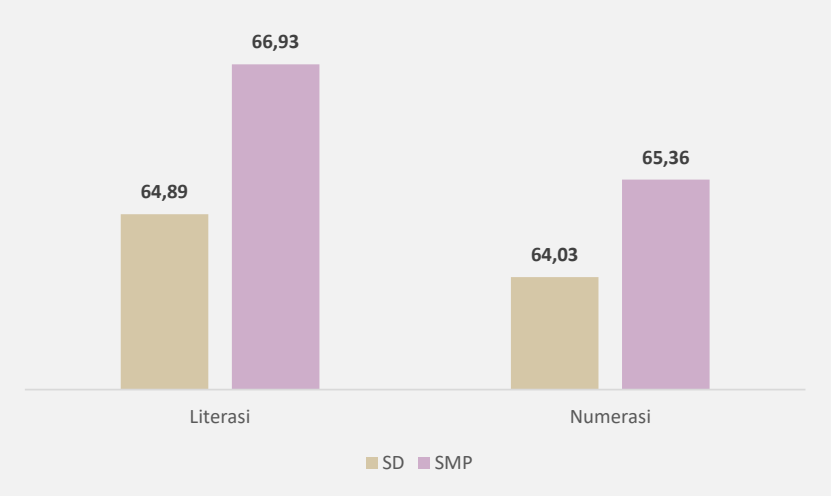
Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan

Dari grafik dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang capaian angka partisipasinya tinggi melebihi 100 persen, ada yang di bawah 100 persen. Kecamatan Jayanti memiliki capaian APM, APK, dan APS di atas 100 persen, hal ini dimungkinkan terdapat peserta didik yang berasal dari luar kecamatan tersebut.

3.2 Capaian Literasi Numerasi

Literasi secara sederhana merujuk pada kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis baik teks informasi (non-fiksi) maupun teks sastra sehingga ia dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Sementara numerasi (atau literasi matematis) adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks yang relevan bagi kehidupan nyata. Dengan kata lain: literasi membantu seseorang “melek baca tulis interprestasi teks”, sedangkan numerasi membantunya “melek angka dan logika matematis” — keduanya adalah keterampilan dasar yang penting tidak hanya di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut hasil Asesmen Nasional 2024, secara agregat kabupaten/kota capaian literasi dan numerasi Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.



Gambar 3.6 Capaian Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP

Berdasarkan grafik capaian literasi dan numerasi Kabupaten Tangerang tahun 2024, terlihat bahwa kemampuan peserta didik menunjukkan tren peningkatan dari

jenjang SD ke jenjang SMP. Pada aspek literasi, capaian SD berada pada angka 64,89, sementara SMP mencapai 66,93, yang menunjukkan adanya perkembangan kemampuan memahami dan menganalisis teks seiring naiknya jenjang pendidikan. Pola serupa juga tampak pada capaian numerasi, di mana SD memperoleh nilai 64,03 dan SMP mencapai 65,36. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep dan penalaran matematis meningkat pada level pendidikan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian literasi sedikit lebih tinggi dibandingkan numerasi di kedua jenjang, namun keduanya menunjukkan konsistensi perkembangan yang positif dari SD ke SMP.

3.3 Data Pokok Pendidikan Dasar

1. Data Satuan Pendidikan

Pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Berarti dalam hal ini, kabupaten Tangerang menaungi jenjang pendidikan dasar yang berada di lingkup wilayah kabupaten Tangerang yaitu tingkat SD dan tingkat SMP. Berikut merupakan jumlah satuan pendidikan yang berada di wilayah kabupaten Tangerang.

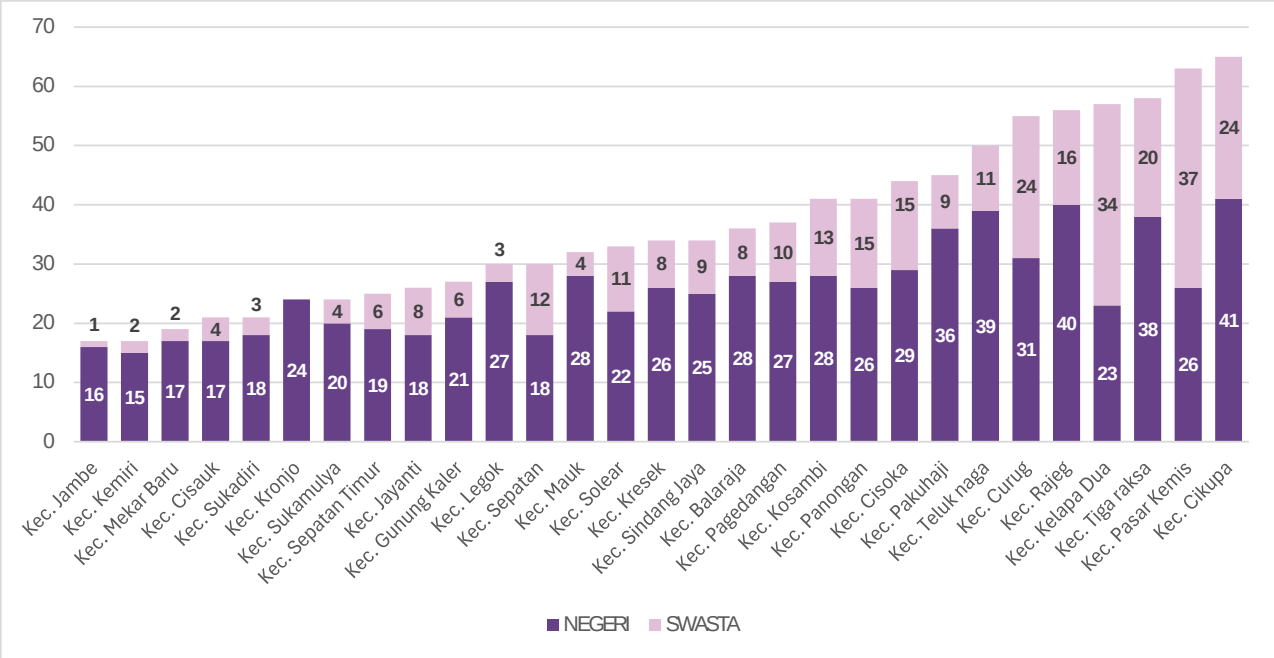
Untuk data satuan pendidikan, peserta didik, PTK maupun variabel lainnya yang dijabarkan merupakan data dari Dapodik saja tidak termasuk madrasah.

Tabel 3.1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Total
Negeri	743	95	838
Swasta	319	396	715
Total	**1.062**	**491**	**1.553**

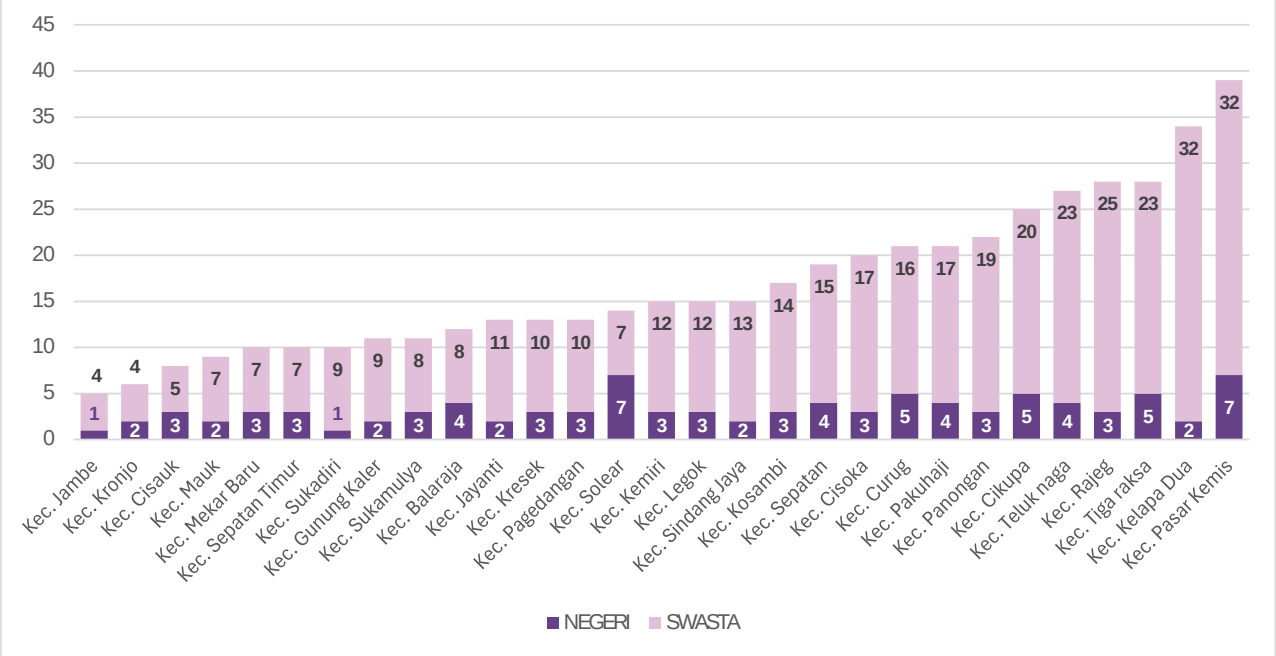
Berdasarkan Tabel 3.1, dapat terlihat bahwa total satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di bawah naungan Kemendikdasmen pada Kabupaten Tangerang berjumlah 1.533 sekolah yang terdiri atas 1.062 SD dan 491 SMP. Pada jenjang SD dapat terlihat jumlah satuan pendidikan negeri lebih banyak daripada

swasta dengan jumlah satuan pendidikan negeri sebanyak 743 dan satuan pendidikan swasta sebanyak 319. Sedangkan, pada jenjang SMP satuan pendidikan swasta lebih banyak dengan total 396 satuan pendidikan, dibandingkan satuan pendidikan negeri yang hanya berjumlah 95 satuan pendidikan.



Gambar 3.7 Sebaran SD Berdasarkan Status Satuan Pendidikan per Kecamatan

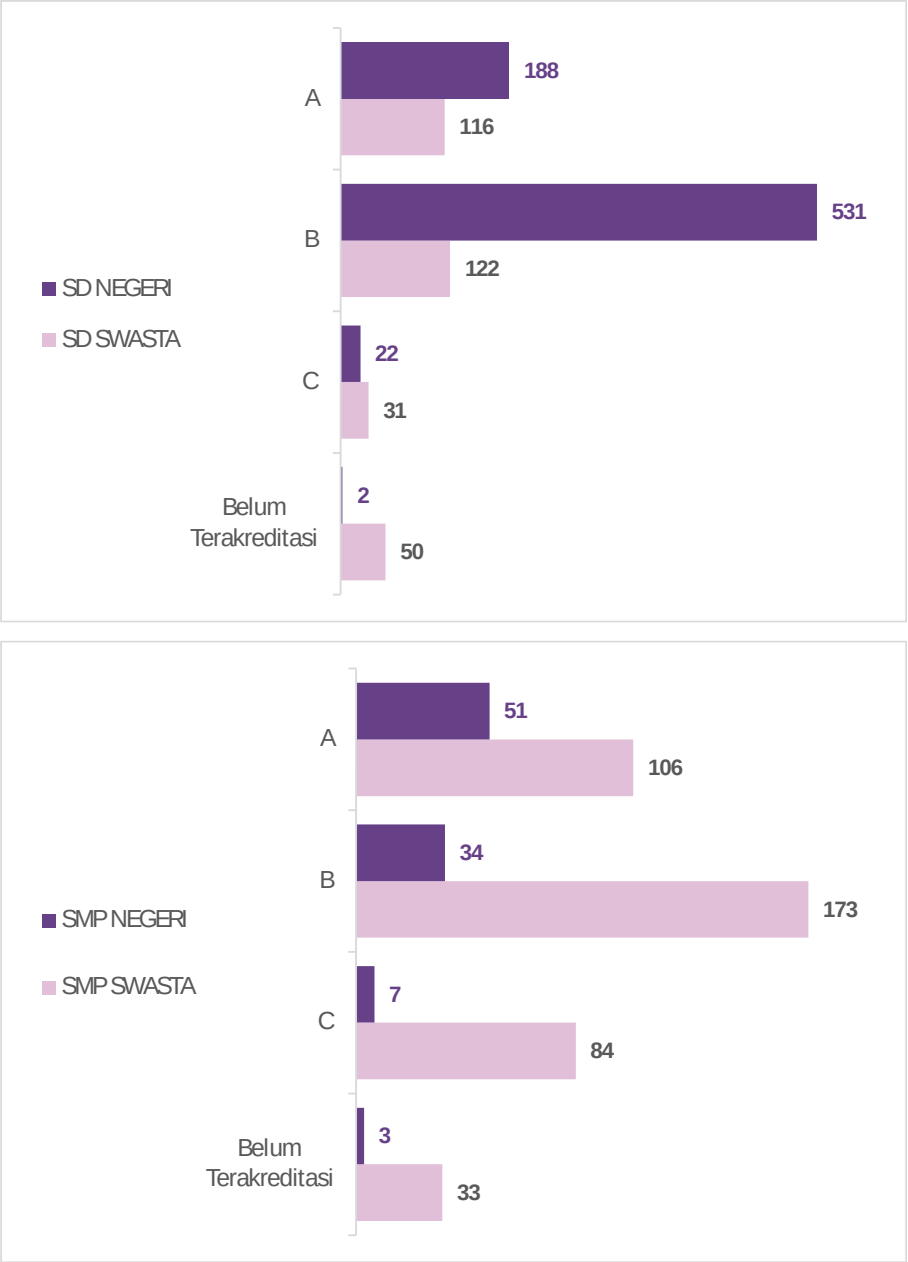
Gambar 3.7 menunjukkan sebaran SD di Kabupaten Tangerang berdasarkan status satuan pendidikan per kecamatan. Dapat terlihat, jumlah SD terbanyak terdapat pada kecamatan Cikupa dengan 41 SD negeri dan 24 SD swasta. Sedangkan jumlah SD paling sedikit terdapat pada kecamatan Kemiri dan Jambe dengan 15 SD negeri dan 2 SD swasta pada kecamatan Kemiri, dan 16 SD negeri dan 1 SD swasta pada kecamatan Jambe. Hampir pada seluruh kecamatan, jumlah satuan pendidikan SD negeri selalu lebih besar dibandingkan satuan pendidikan SD swasta, kecuali pada Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Pasar Kemis.



Gambar 3.8 Sebaran SMP Berdasarkan Status Satuan Pendidikan per Kecamatan

Pada tingkat SMP, jumlah satuan pendidikan paling banyak terdapat pada Kecamatan Pasar Kemis dengan 7 SMP negeri dan 32 SMP swasta. Sedangkan jumlah satuan pendidikan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Jambe dengan 1 SMP negeri dan 4 SMP swasta. Berbeda dengan tingkat SD, pada tingkat SMP jumlah satuan pendidikan swasta selalu lebih banyak dibandingkan jumlah satuan pendidikan negeri.

Gambar 3.9 menunjukkan jumlah satuan pendidikan berdasarkan status dan akreditasi satuan pendidikan. Pada tingkat SD, sebagian besar satuan pendidikan memiliki akreditasi B baik untuk SD negeri maupun SD swasta. Sebanyak 531 SD dari total 743 SD negeri memiliki akreditasi B. Sementara pada tingkat SMP, terdapat perbedaan pada SMP negeri dan SMP swasta. Pada SMP swasta, paling banyak memiliki akreditasi B yaitu sebanyak 173 SMP, sementara pada SMP negeri lebih banyak yang memiliki akreditasi A yaitu 51 SMP.



Gambar 3.9 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi

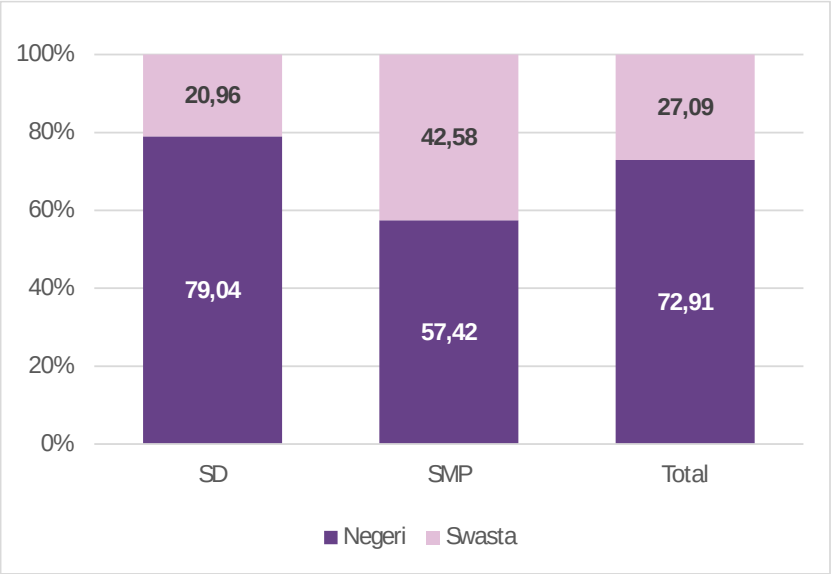
2. Data Sumber Daya Manusia

a. Peserta Didik

Peserta didik atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan sumber data dari DAPODIK, jumlah peserta didik pada jenjang SD dan SMP pada satuan pendidikan negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Total
Negeri	276.663	79.551	356.214
Swasta	73.373	58.987	132.360
Total	**350.036**	**138.538**	**488.574**

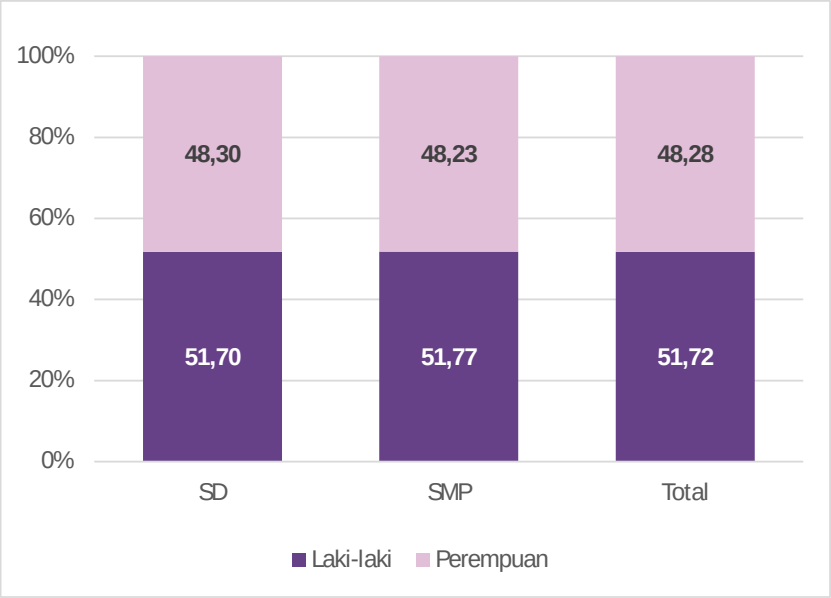


Gambar 3.10 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Gambar 3.10 dapat diperoleh informasi bahwa jumlah peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Tangerang yaitu berjumlah 488.574 peserta didik. Jumlah peserta didik SD yaitu 350.036 peserta didik dengan 276.663 (79,04%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan 73.373 (20,96%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Kemudian jumlah peserta didik SMP yaitu berjumlah 138.538 peserta didik dengan 79.551 (57,42%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan 58.987 (42,58%) peserta didik merupakan peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik pada satuan pendidikan negeri yaitu 356.214 peserta didik atau 72,91% dan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan swasta yaitu 132.360 peserta didik atau 27,09%.

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki-laki	180.985	71.725	252.710
Perempuan	169.051	66.813	235.864
Total	**350.036**	**138.538**	**488.574**



Gambar 3.11 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Gambar 3.11 dapat diperoleh informasi jumlah peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Tengerang berdasarkan jenis kelamin. Pada jenjang SD, jumlah peserta didik laki-laki yaitu 180.985 (51,70%), sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik perempuan yaitu 169.051 (48,30%). Kemudian pada jenjang SMP, jumlah peserta didik laki-laki yaitu 71.725 (51,77%), juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik perempuan yaitu 66.813 (48,23%). Data peserta didik berdasarkan tingkatan kelas dan rombongan belajar pada jenjang SD dan SMP disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SD

Tingkat	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Rasio Peserta Didik per Rombel
Tingkat 1	62.720	2.237	28
Tingkat 2	62.176	2.162	29
Tingkat 3	59.548	2.058	29
Tingkat 4	59.182	2.050	29
Tingkat 5	52.594	1.854	28
Tingkat 6	53.816	1.878	29
Total	**350.036**	**12.239**	**29**

Tabel 3.4 menampilkan jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio peserta didik per rombel pada jenjang SD. Jumlah peserta didik terbanyak terdapat pada Kelas 1 yaitu 62.720 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil terdapat pada Kelas 5 yaitu 52.594 peserta didik. Jumlah seluruh rombel SD yaitu sebanyak 12.239, sehingga secara umum rasio peserta didik per rombel adalah 29. Artinya, pada jenjang SD rata-rata jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 29 peserta didik.

Tabel.3.5 Jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP

Tingkat	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Rasio Peserta Didik per Rombel
Tingkat 7	47.972	1.481	32
Tingkat 8	46.232	1.453	32
Tingkat 9	44.334	1.382	32
Total	**138.538**	**4.316**	**32**

Tabel 3.5 menampilkan jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio peserta didik per rombel pada jenjang SMP. Jumlah peserta didik terbanyak terdapat pada Kelas 7 yaitu 47.972 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil terdapat pada Kelas 9 yaitu 44.334 peserta didik. Jumlah seluruh rombel SMP yaitu sebanyak 4.316, sehingga secara umum rasio peserta didik per rombel adalah 32. Artinya, pada jenjang SMP rata-rata jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 32 peserta didik.

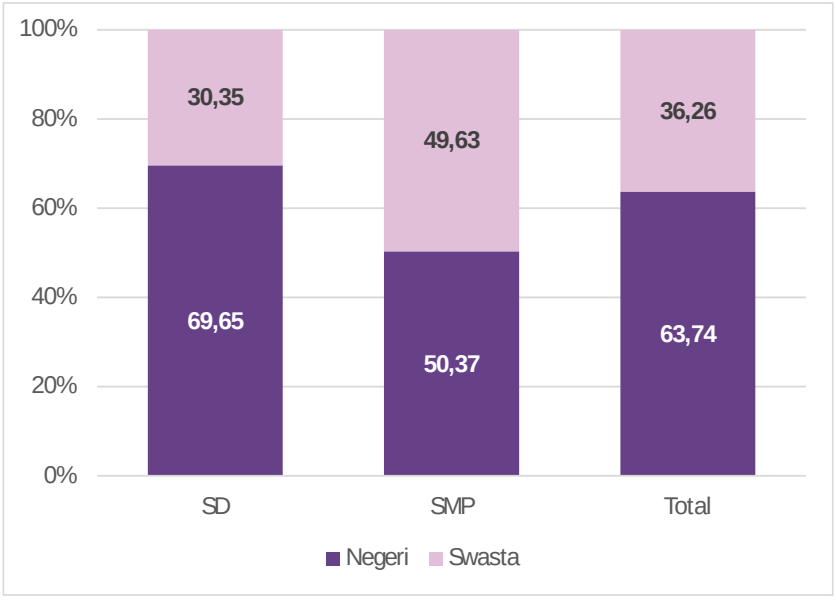
b. Pendidik

Pendidik atau guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005, pasal 8). Data pendidik jenjang yang berada di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Jumlah Pendidik berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Total
Negeri	9.282	2.971	12.253
Swasta	4.044	2.927	6.971
Total	**13.326**	**5.898**	**19.224**



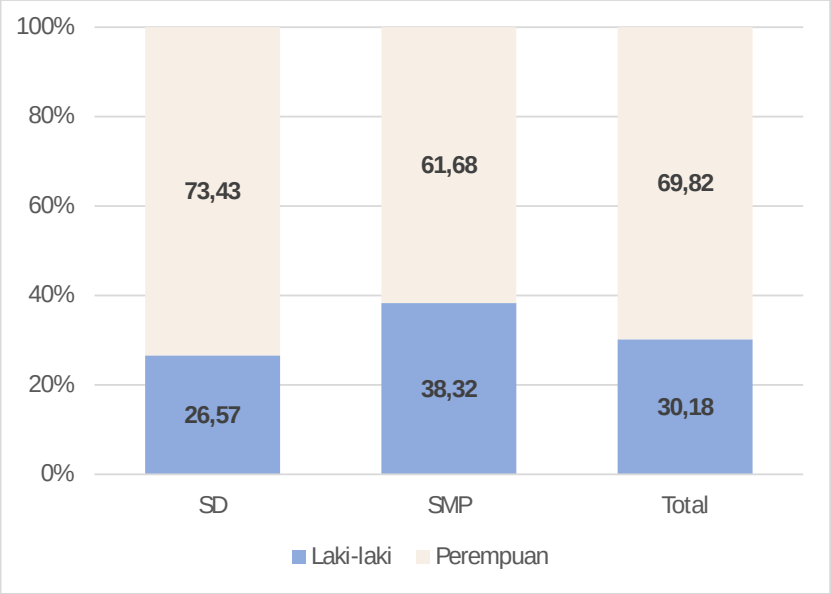
Gambar 3.12 Persentase Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat terlihat bahwa total pendidik jenjang pendidikan dasar pada Kabupaten Tangerang berjumlah 19.224 pendidik yang terdiri atas 13.326 pendidik SD dan 5.898 pendidik SMP.

Pada SD jumlah pendidik satuan pendidikan negeri lebih banyak daripada pendidik di satuan pendidikan swasta, dengan jumlah pendidik di satuan pendidikan negeri sebesar 9.282 pendidik dan swasta 4.044 pendidik. Hal yang sama juga terjadi pada SMP namun dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh, jumah pendidik satuan pendidik negeri sedikit lebih banyak yaitu 2.971 pendidik sementara jumlah pendidik di satuan pendidikan swasta berjumlah 2.927 pendidik.

Tabel 3.7 Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki-laki	3.541	2.260	5.801
Perempuan	9.785	3.638	13.423
Total	**13.326**	**5.898**	**19.224**

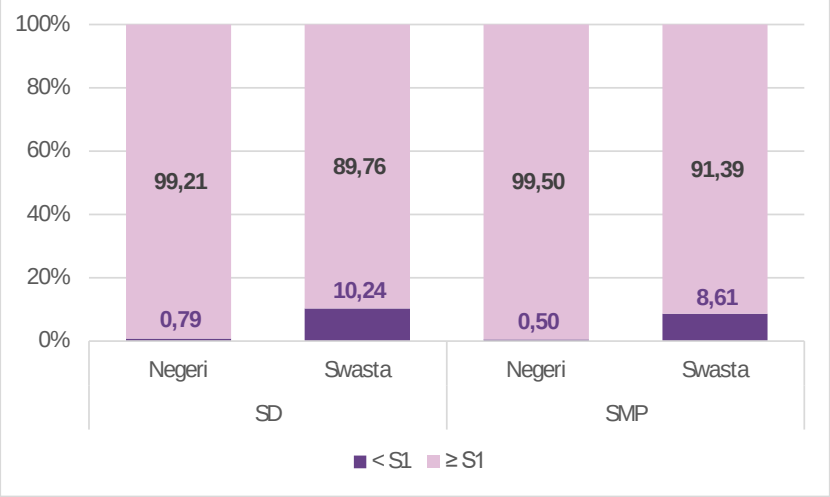


Gambar 3.13 Persentase Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik pada tingkat SD maupun SMP jumlah pendidik perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan pendidik laki-laki. Pada tingkat SD, persentase pendidik perempuan 73,43% dibandingkan dengan total pendidik. Begitu pula pada tingkat SMP, namun dengan persentase yang sedikit lebih kecil yaitu persentase pendidik perempuan sebesar 61,68% dibandingkan dengan total pendidik.

Tabel 3.8 Jumlah Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	SD		SMP		Total
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
< S1	73	414	15	252	754
≥ S1	9.209	3.630	2.956	2.675	18.470
Total	**9.282**	**4.044**	**2.971**	**2.927**	**19.224**



Gambar 3.14 Persentase Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Status Satuan Pendidikan

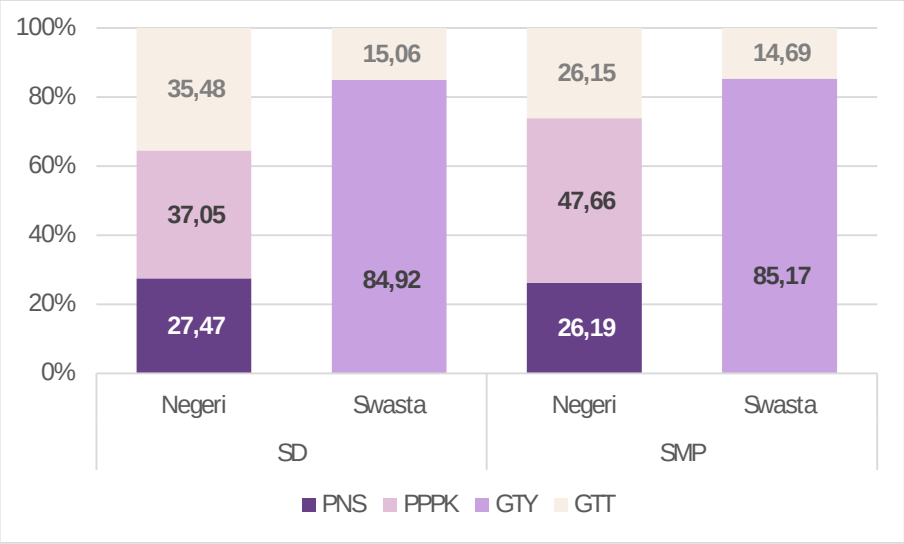
Tabel 3.8 dan Gambar 3.14 menampilkan data pendidik SD dan SMP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan status satuan pendidikan. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, secara keseluruhan hampir seluruh pendidik pada SD dan SMP negeri sudah memiliki ijazah S1, namun masih terdapat 73 pendidik SD atau 0,79% pendidik dan 15 pendidik SMP atau 0,50% pendidik pada satuan pendidikan negeri yang belum memiliki ijazah S1. Kemudian pada satuan pendidikan swasta, 89,76% pendidik SD dan 91,39% pendidik SMP sudah memiliki ijazah S1. Namun terdapat 414 (10,24%) pendidik SD dan 252 (8,61%) pendidik SMP yang masih belum memiliki ijazah S1.

Tabel 3.9 Jumlah Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian dan Status Satuan Pendidikan

Status Kepegawaian	SD		SMP		Total
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
PNS	2.550	1	778	3	3.332
PPPK	3.439	-	1.416	1	4.856
GTY	-	3.434	-	2.493	5.927
GTT	3.293	609	777	430	5.109
Total	**9.282**	**4.044**	**2.971**	**2.927**	**19.224**

Berdasarkan status kepegawaiannya, pada SD Negeri pendidik dengan status kepegawaian PPPK merupakan pendidik dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 3.439 pendidik atau 37,05% dari total pendidik. Selanjutnya pendidik dengan status GTT sejumlah 3.293 pendidik atau 35,48%, dan 2.550 pendidik atau 27,47% pendidik dengan status PNS. Pada SD Swasta, mayoritas pendidik berstatus GTY yaitu sebanyak 3.434 pendidik atau 84,92% dari total pendidik, dan masih terdapat 609 (15,06%) pendidik yang masih berstatus GTT.

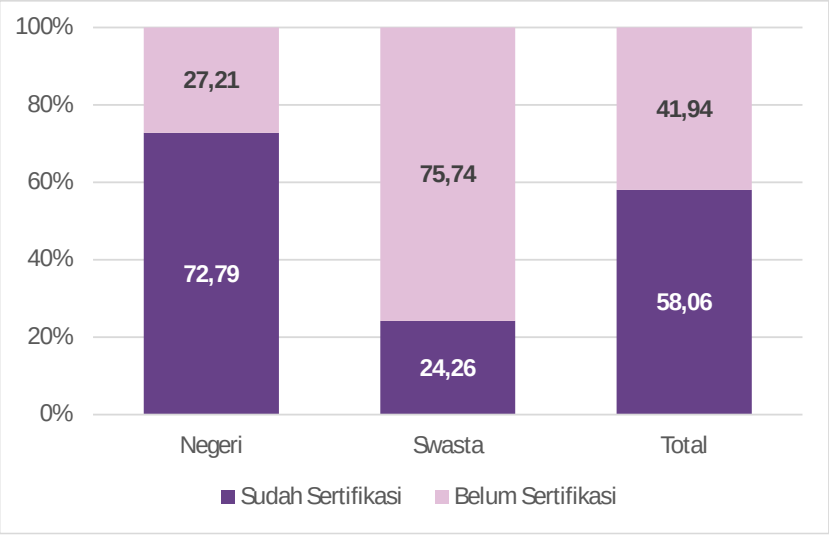
Pada SMP Negeri, sebanyak 1.416 pendidik atau 47,66% pendidik dengan status kepegawaian PPPK. Kemudian jumlah antara pendidik PNS dan GTT hampir sama, yaitu 778 pendidik PNS dan 777 pendidik dengan status kegepawaian GTT. Pada SMP Swasta, 85,17% atau sebanyak 2.493 pendidik sudah berstatus GTY, meskipun masih ada pendidik dengan status GTT yaitu sebanyak 430 pendidik atau 14,69%. Kemudian, terdapat tiga pendidik PNS dan satu pendidik PPPK pada SMP Swasta di Kabupaten Tangerang.



Gambar 3.15 Persentase Pendidik berdasarkan Status Kepegawaian dan Status Satuan Pendidikan

Tabel 3.10 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	SD		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah Sertifikasi	6.756	981	7.737
Belum Sertifikasi	2.526	3.063	5.589
Total	**9.282**	**4.044**	**13.326**



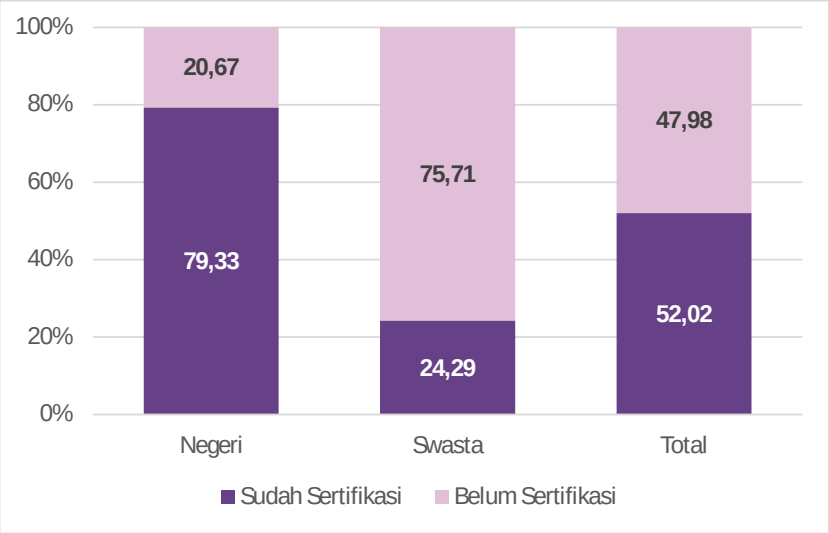
Gambar 3.16 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan status sertifikasi pendidik SD, terdapat 7.737 pendidik atau 58,06% yang sudah memiliki sertifikat pendidik dari total 13.326 pendidik SD. Jika dilihat berdasarkan status satuan pendidikan, persentase pendidik SD negeri yang memiliki sertifikasi jauh lebih tinggi dibandingkan pendidik SD swasta. Pada SD negeri, terdapat 6.756 pendidik atau 72,79% pendidik yang sudah sertifikasi, artinya masih ada 27,21% pendidik yang belum memiliki sertifikasi. Sementara pada satuan pendidikan swasta, terdapat 981 pendidik atau 24,26% pendidik yang sudah sertifikasi.

Tabel 3.11 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	SMP		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah Sertifikasi	2.357	711	3.068
Belum Sertifikasi	614	2.216	2.830
Total	**2.971**	**2.927**	**5.898**

Pada tingkat SMP, terdapat 3.068 pendidik atau 52,02% yang sudah sertifikasi dari total 5.898 pendidik SMP. Jika dilihat berdasarkan status satuan pendidikan, persentase pendidik SMP negeri yang memiliki sertifikasi lebih tinggi dibandingkan pendidik SMP swasta. Pada SMP negeri, terdapat 2.357 pendidik atau 79,33% pendidik yang sudah sertifikasi. Sementara pada SMP swasta, terdapat 711 pendidik atau sebanyak 24,29% pendidik yang sudah sertifikasi.



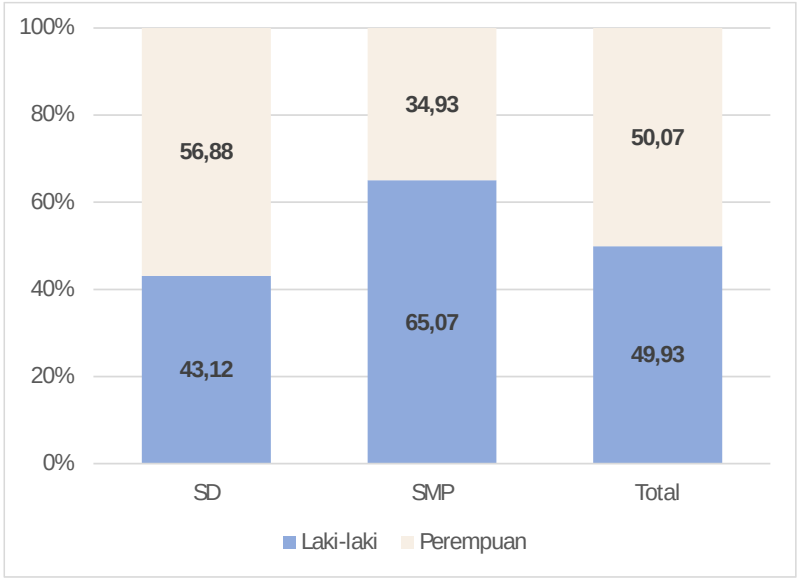
Gambar 3.17 Persentase Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

c. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berasarkan pada DAPODIK, data Kepala Sekolah pada tingkat SD dan SMP negeri maupun swasta disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.12 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD			SMP			Total
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S	
Laki-laki	285	116	401	44	228	272	673
Perempuan	365	164	529	26	120	146	675
Total	**650**	**280**	**930**	**70**	**348**	**418**	**1.348**

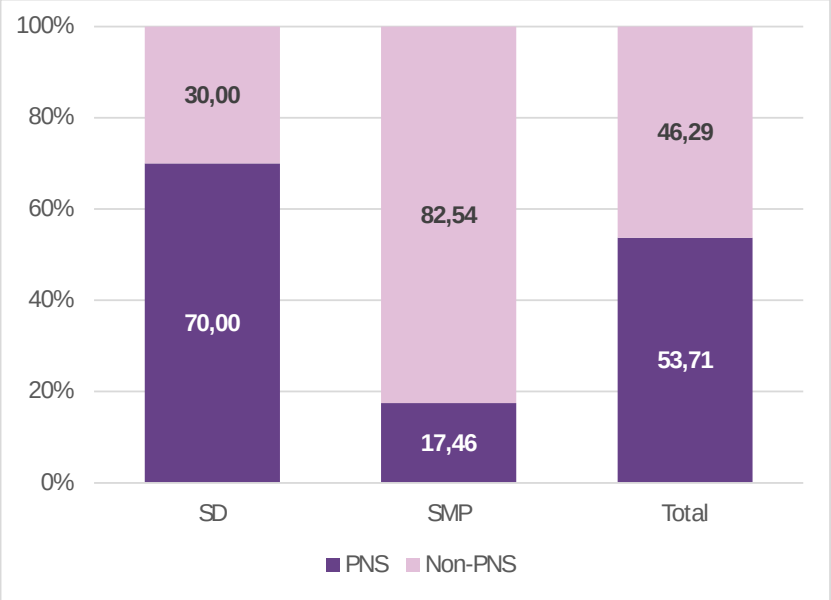


Gambar 3.18 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.12 dan Gambar 3.18 dapat diperoleh informasi jumlah Kepala Sekolah (KS) berdasarkan jenis kelamin pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada tingkat SD, jumlah KS laki-laki yaitu 401 orang (43,12%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Perempuan yaitu 529 orang (56,88%). Berbeda dengan tingkat SD, pada tingkat SMP jumlah KS laki-laki yaitu 272 orang (65,07%) lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan yaitu 146 orang (34,93%). Secara keseluruhan, KS laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan.

Tabel 3.13 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	SD			SMP			Total
	Negeri	Swasta	N+S	Negeri	Swasta	N+S	
PNS	650	1	651	70	3	73	724
Non-PNS	-	279	279	-	345	345	624
Total	**650**	**280**	**930**	**70**	**348**	**418**	**1.348**



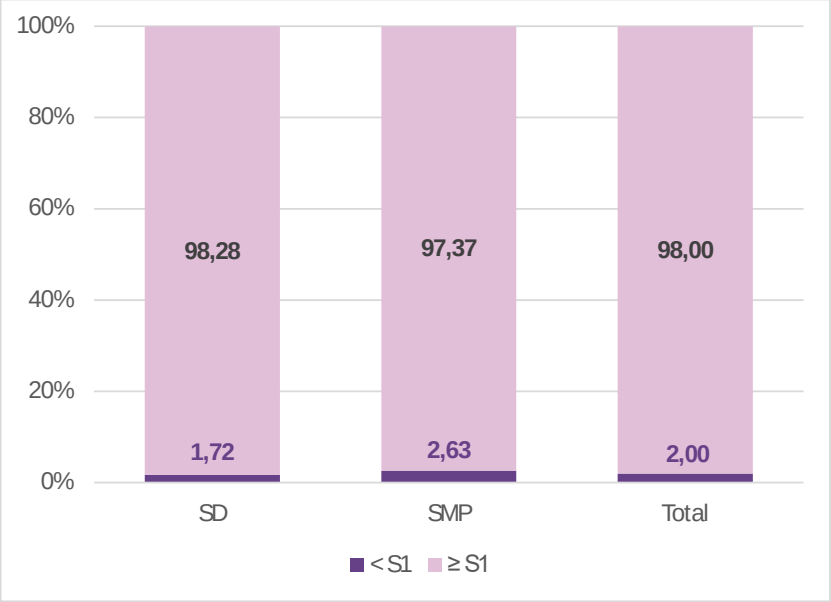
Gambar 3.19 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 3.13 dan Gambar 3.19 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan status kepegawaian pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada tingkat SD, KS PNS yaitu 651 orang (70,00%) lebih banyak dibandingkan KS Non-PNS yaitu 279 orang (30,00%). Sementara pada jenjang SMP, KS PNS yaitu 73 orang (17,46%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Non-PNS yaitu 332 orang (81,98%), hal ini tentu bersesuaian dengan komposisi status SMP

di Kabupaten Tangerang, dimana kondisinya satuan pendidikan negeri lebih sedikit dibandingkan satuan pendidikan swasta. Kemudian baik pada tingkat SD dan SMP, seluruh KS pada satuan pendidikan negeri sudah berstatus PNS.

Tabel 3.14 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	SD			SMP			Total
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S	
< S1	2	14	16	-	11	11	27
≥ S1	648	266	914	70	337	407	1.321
Total	**650**	**280**	**930**	**70**	**348**	**418**	**1.348**

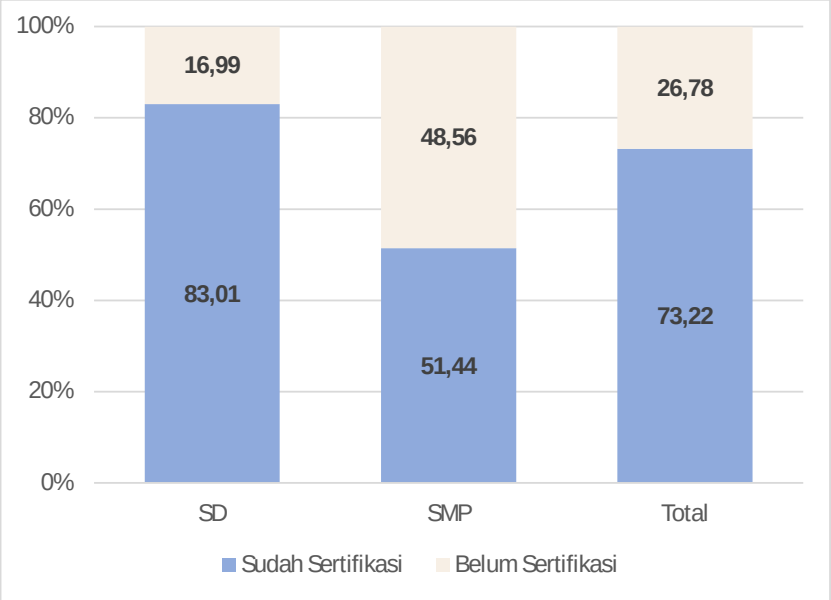


Gambar 3.20 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.14 dan Gambar 3.20 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan kualifikasi pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, 909 (99,34%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 6 (0,66%) KS SD yang belum S1/D4. Kemudian pada jenjang SMP, 396 (97,78%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 9 (2,22%) KS SMP yang belum S1/D4. Secara keseluruhan pada jenjang SD dan SMP, KS yang sudah berkualifikasi S1/D4 yaitu sebesar 98,86%.

Tabel 3.15 Jumlah Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	SD			SMP			Total
	Negeri	Swasta	N + S	Negeri	Swasta	N + S	
Sudah Sertifikasi	648	124	772	68	147	215	987
Belum Sertifikasi	2	156	158	2	201	203	361
Total	**650**	**280**	**930**	**70**	**348**	**418**	**1.348**



Gambar 3.21 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan Tabel 3.15 dan Gambar 3.21 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan status sertifikasi pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada tingkat SD, dari 930 KS, 772 (83,01%) diantaranya sudah bersertifikat. Sementara pada tingkat SMP, dari 418 KS, 215 (51,44%) diantaranya sudah bersertifikat. Secara keseluruhan, 73,22% KS tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang sudah bersertifikat pendidik.

d. Pengawas Sekolah dan Penilik

Tugas Pokok Pengawas yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tabel 3.16 Pengawas Sekolah tingkat SD dan SMP

Tingkat	Pengawas	Satuan Pendidikan
Pengawas SD	30	1.062
Pengawas SMP	30	491
Total	**60**	**1.553**

Berdasarkan Tabel 3.16, di Kabupaten Tangerang terdapat 60 pengawas, dengan masing-masing tingkat SD dan SMP memiliki 30 pengawas. Artinya, pada SD rata-rata satu pengawas mengawasi 35 sekolah, sementara pada SMP rata-rata satu pengawas mengawasi 16 sekolah.

Sedangkan Penilik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan. Penilik juga dapat diartikan sebagai orang yang menilik atau mengawasi. Penilik Paud Dikmas adalah PNS yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Penilik Paud Dikmas berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Tangerang ada 36 penilik.

e. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan DAPODIK, berikut data tenaga penunjang kependidikan jenjang SD dan SMP.

Tabel 3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD

Tenaga Kependidikan	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	1	1
Penjaga Sekolah	473	28	501
Pesuruh/Office Boy	27	33	60
Petugas Keamanan	12	11	23
Tenaga Administrasi Sekolah	499	289	788
Tenaga Perpustakaan	44	19	63
Total	**1.055**	**381**	**1.436**

Tabel 3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP

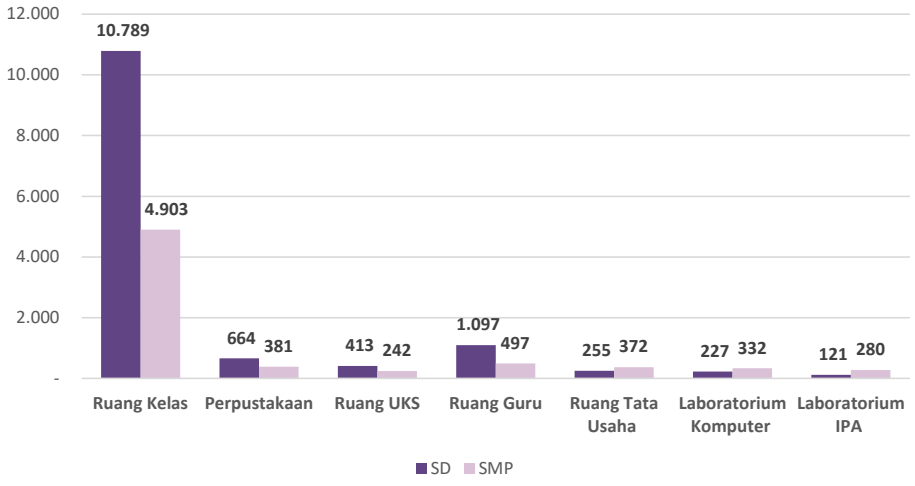
Tenaga Kependidikan	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	4	4
Penjaga Sekolah	121	24	145
Pesuruh/Office Boy	70	27	97
Petugas Keamanan	36	18	54
Tenaga Administrasi Sekolah	342	311	653
Tenaga Perpustakaan	19	16	35
Total	**588**	**400**	**988**

f. Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting bagi terciptanya proses pembelajaran karena merupakan pendukung keamanan dan kenyamanan dalam belajar. Berikut merupakan data komponen sarana prasarana SD dan SMP berdasarkan inputan satuan pendidikan pada Dapodik:

Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis Sarana

Sarana Prasarana	SD			SMP		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Ruang Kelas	7.308	3.481	10.789	2.094	2.809	4.903
Perpustakaan	441	223	664	90	291	381
Ruang UKS	240	173	413	48	194	242
Ruang Guru	761	336	1.097	91	406	497
Ruang Tata Usaha	92	163	255	85	287	372
Laboratorium Komputer	64	163	227	60	272	332
Laboratorium IPA	24	97	121	82	198	280



Gambar 3.22 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis

Berdasarkan Gambar 3.22, dapat terlihat jumlah ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, dan ruang UKS lebih banyak pada SD daripada SMP, karena jumlah satuan pendidikan dan rombongan belajar pada SD memang lebih besar daripada SMP. Sedangkan, jumlah ruang TU, Laboratorium Komputer, dan Laboratorium IPA lebih besar pada tingkat SMP daripada SD. Hal ini mungkin disebabkan, karena kebutuhan laboratorium Komputer dan IPA untuk pembelajaran lebih besar pada tingkat SMP. Sedangkan ruang TU biasanya pada tingkat SD masih menjadi satu ruangan dengan ruang guru.

Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Pendidik	414	295	353
Peserta Didik	861	119	82

Tabel 3.20 menjelaskan kepemilikan toilet di tingkat SD. Dapat terlihat bahwa untuk toilet pendidik, terdapat 414 satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet terpisah, berarti terdapat minimal satu toilet untuk pendidik laki-laki dan satu toilet untuk pendidik perempuan. Kemudian, sebanyak 295 satuan pendidikan memiliki toilet pendidik bersama. Sedangkan, masih terdapat 353 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet pendidik sama sekali. Kemudian untuk toilet peserta didik, sebagian besar satuan pendidikan sudah memiliki toilet peserta didik namun masih terdapat 82 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet peserta didik. Di antara satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet peserta didik, 861 satuan pendidikan sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 119 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Pendidik	262	92	137
Peserta Didik	398	43	50

Pada tingkat SMP, dapat terlihat untuk toilet pendidik terdapat 354 satuan pendidikan yang telah memiliki toilet dengan rincian 262 satuan pendidikan memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 92 lainnya merupakan toilet bersama. Terdapat 137 satuan Pendidikan yang tidak memiliki toilet pendidik. Kemudian untuk

toilet peserta didik, kebanyakan satuan pendidikan sudah memiliki toilet peserta didik namun masih terdapat 50 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet peserta didik. Di antara satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet peserta didik, 398 satuan pendidikan sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 43 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP

Ketersediaan Sarana Prasarana	SD			SMP		
	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase
Ruang Kelas	10.789	1.450	88,15	4.903	- 587	113,60
Perpustakaan	632	430	59,51	363	128	73,93
Ruang UKS	405	657	38,14	233	258	47,45
Ruang Guru	962	100	90,58	449	42	91,45
Ruang Tata Usaha	248	814	23,35	345	146	70,26
Laboratorium Komputer	209	853	19,68	300	191	61,10
Laboratorium IPA	115	947	10,83	236	255	48,07

Kebutuhan ruang kelas dapat dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar. Pada tingkat SD, rombongan belajar berjumlah 12.239 dan ruang kelas berjumlah 10.789, yang berarti masih ada kekurangan sebesar 1.450 kelas atau baru 88,15 persen ruang kelas yang terpenuhi. Sedangkan pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas lebih banyak daripada rombongan belajar, yaitu tersedia 4.903 ruang kelas untuk 4.316 rombongan belajar.

Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, ruang UKS, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap satuan pendidikan minimal memiliki satu ruang guru, ruang TU, perpustakaan, ruaang UKS, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

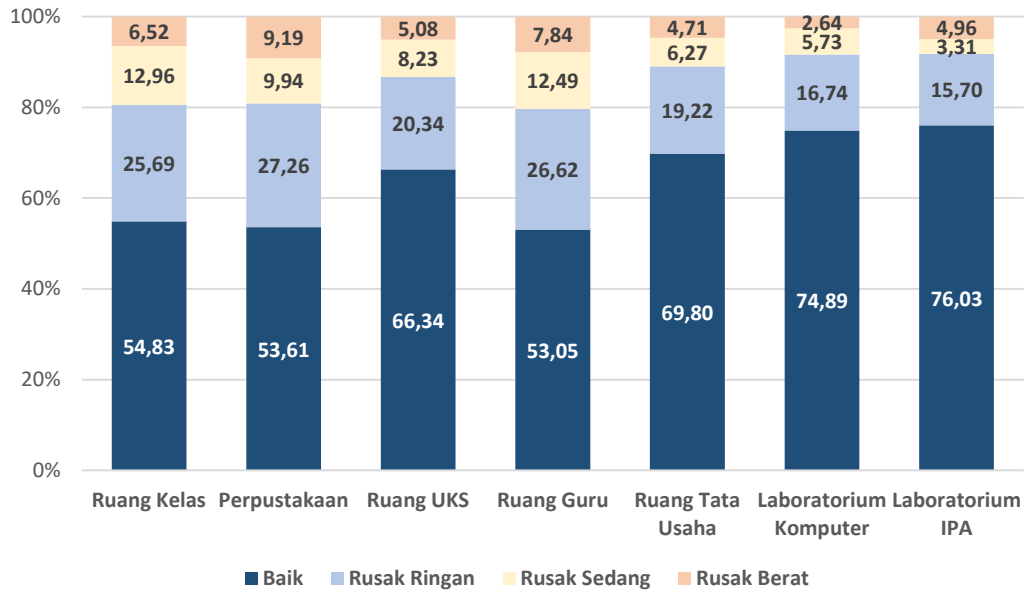
Ketersediaan ruang guru baik pada SD maupun SMP sudah di atas 90% yang artinya sudah cukup banyak satuan pendidikan yang memiliki ruang guru, namun untuk ruang TU, hanya 23,35% SD dan 70,26% SMP yang memiliki ruang TU. Kemudian, ketersediaan perpustakan pada tingkat SD masih sebesar 53,91% sedangkan SMP sudah cukup tinggi yaitu 73,93% satuan pendidikan yang sudah memiliki perpustakaan. Untuk ketersediaan ruang UKS pada tingkat SD sebesar 38,14% dan 47,75% pada tingkat SMP. Untuk laboratoriu m, pada tingkat SD

ketersediaannya masih cukup rendah yaitu 19,68% untuk Lab. Komputer dan 10,83% untuk Lab. IPA.

Lalu untuk tingkat SMP, ketersediaan Lab. Komputer sudah lebih dari setengah yang memiliki yaitu 61,10% satuan pendidikan dan 48,07% satuan pendidikan yang memiliki Lab. IPA.

Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	5.916	2.772	1.398	703
Perpustakaan	356	181	66	61
Ruang UKS	274	84	34	21
Ruang Guru	582	292	137	86
Ruang Tata Usaha	178	49	16	12
Laboratorium Komputer	170	38	13	6
Laboratorium IPA	92	19	4	6



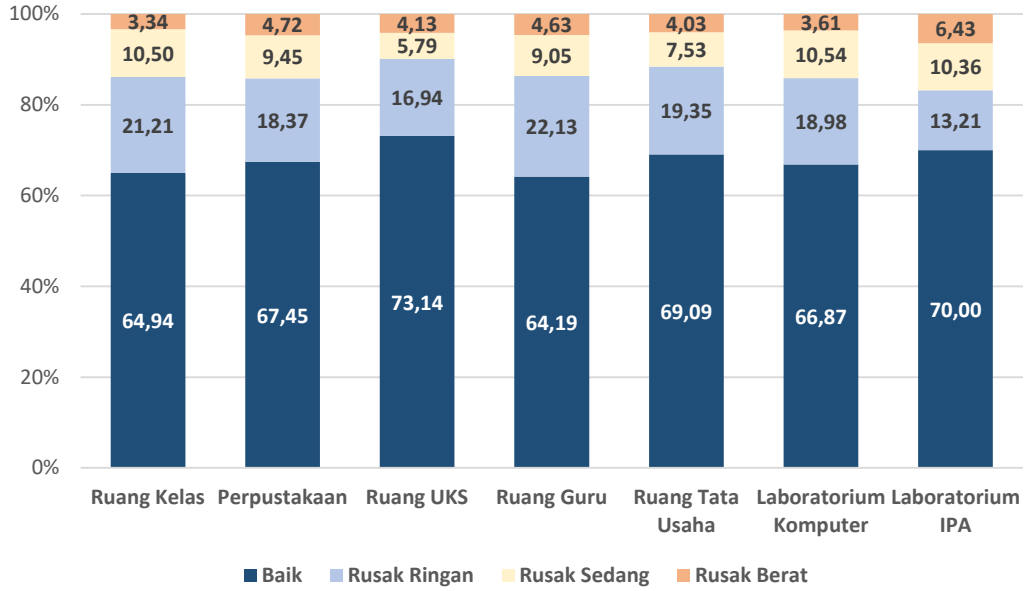
Gambar 3.23 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Tabel dan grafik di atas menjelaskan bagaimana kondisi sarana prasarana yang terdapat di tingkat SD. Pada ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan hanya sekitar 53% ruangan dengan kondisi baik, selebihnya memiliki tingkat kerusakan yang beragam. Kemudian untuk ruang UKS terdapat 66,34% dan ruang TU terdapat

69,80% ruang dengan kondisi baik. Lalu pada laboratorium, baik IPA maupun komputer ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 70%.

Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	3.184	1.040	515	164
Perpustakaan	257	70	36	18
Ruang UKS	177	41	14	10
Ruang Guru	319	110	45	23
Ruang Tata Usaha	257	72	28	15
Laboratorium Komputer	222	63	35	12
Laboratorium IPA	196	37	29	18



Gambar 3.24 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Secara keseluruhan, kondisi sarana prasarana di tingkat SMP lebih baik dibandingkan SD. Pada semua kategori, ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 60%, meskipun juga masih ada kondisi rusak sedang dan rusak berat pada semua kategori.

3.2 Data Pokok Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

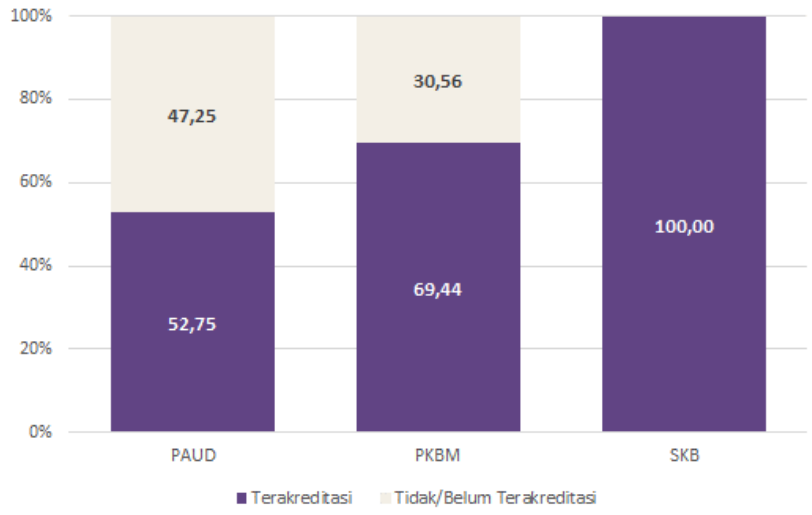
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyelenggarakan program pendidikan yaitu Paket A setingkat jenjang SD, Paket B setingkat jenjang SMP dan Paket C setingkat jenjang SMA.

Satuan PNF sejenis atau yang lebih dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berbentuk Satuan Pendikan Nonformal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Berikut data terkait pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi data satuan pendidikan/ lembaga, peserta didik/warga belajar, dan pendidik/tutor.

1. Data Lembaga Pendidikan Nonformal

Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal

Lembaga	NEGERI		SWASTA		Grand Total
	Terakreditasi	Tidak/Belum Terakreditasi	Terakreditasi	Tidak/Belum Terakreditasi	
PAUD	**15**	**1**	**868**	**790**	**1.674**
KB	-	-	376	444	820
SPK KB	-	-	-	1	1
TK	15	1	430	302	748
SPK TK	-	-	2	-	2
SPS	-	-	59	41	100
TPA	-	-	1	2	3
PKBM	**-**	**-**	**75**	**33**	**108**
SKB	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**
Grand Total	**16**	**1**	**943**	**823**	**1.783**

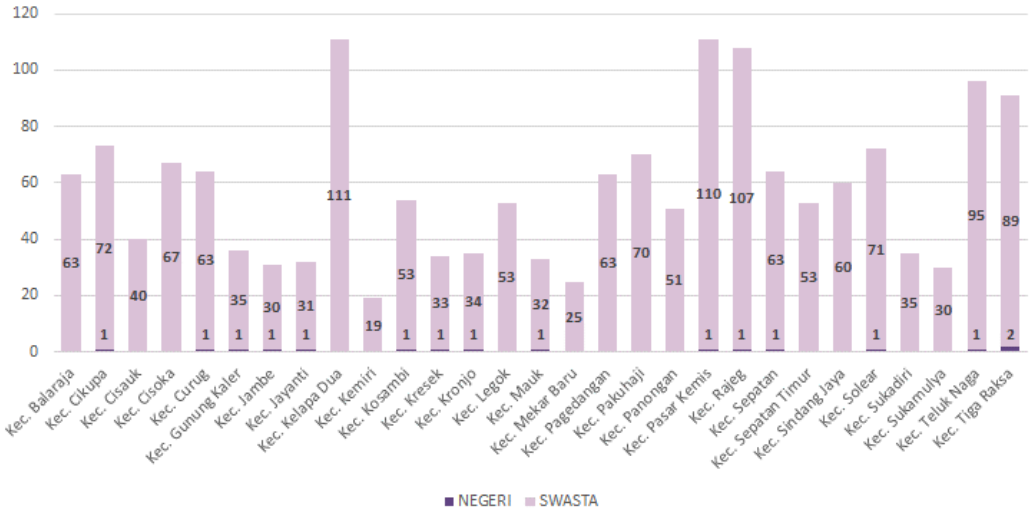


Gambar 3.25 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Tabel 3.25 dan Gambar 3.25 dapat diketahui bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 1.674 dengan status 16 PAUD negeri dan 1.658 PAUD swasta. Dari 1.658 PAUD, 883 (52,75%) diantaranya sudah terakreditasi. Kemudian terdapat 108 PKBM, dengan 75 (69,44%) diantaranya sudah terakreditasi, serta terdapat satu SKB dan sudah terakreditasi.

Berikut Sebaran Data Lembaga Pendidikan Nonformal di tiap kecamatan Kabupaten Tangerang:

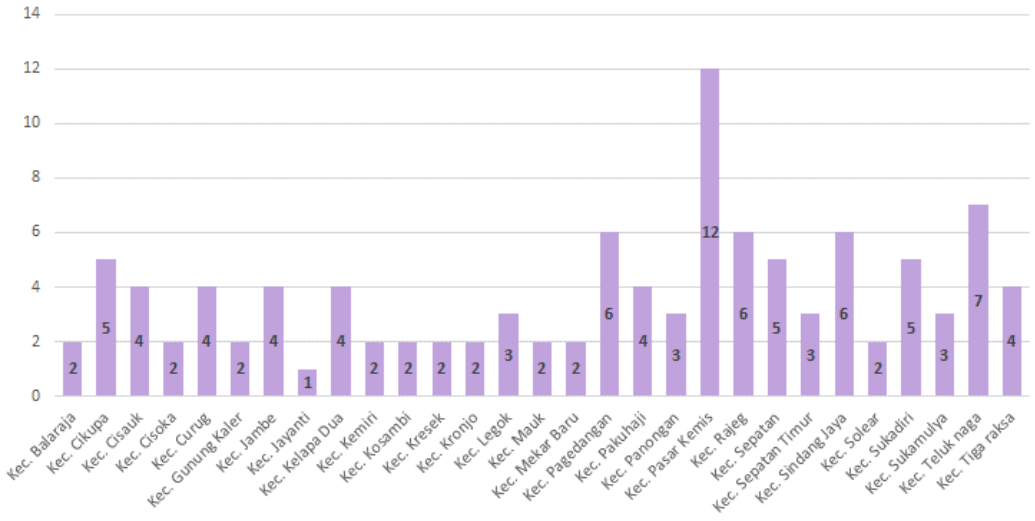
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Gambar 3.26 Sebaran Data PAUD

Sejumlah 1.674 PAUD tersebar di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Lembaga PAUD paling sedikit berada di Kecamatan Kemiri yaitu 19 lembaga dan terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 110 lembaga. Berdasarkan status lembaga, terdapat 16 satuan pendidikan negeri yang tersebar pada 15 kecamatan (dapat dilihat pada Gambar 3.26).

b. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)



Gambar 3.27 Sebaran Data PKBM dan SKB

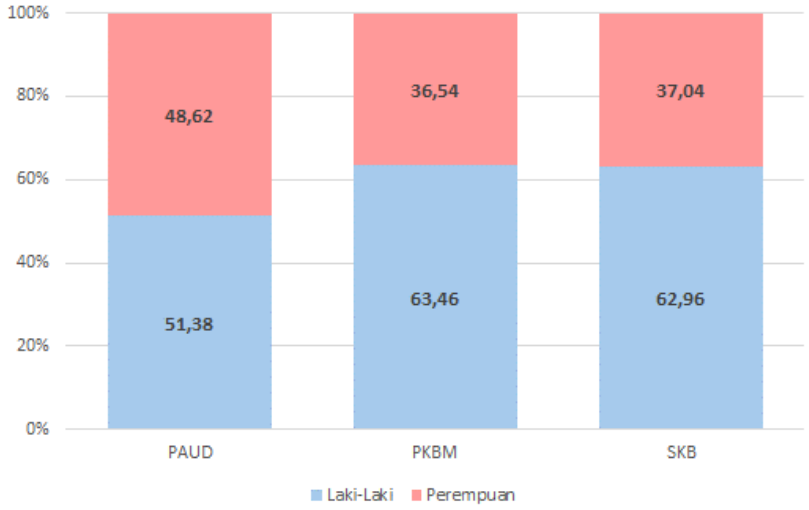
Sejumlah 108 PKBM dan satu SKB tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tangerang. Lembaga PKBM terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 12 lembaga, kemudian pada Kecamatan Teluk Naga ada tujuh lembaga PKBM. Sementara pada kecamatan lainnya, terdapat minimal satu lembaga PKBM/SKB.

2. Data Peserta Didik/ Warga Belajar

Peserta Didik pada lembaga Pendidikan Nonformal bervariasi, mulai dari kelompok usia 0 sampai 6 Tahun untuk peserta didik PAUD, usia 7 sampai dengan 18 tahun atau lebih bagi peserta didik PKBM/SKB.

Tabel 3.26 Peserta Didik/ Warga Belajar Pendidikan Nonformal

Lembaga	Jumlah Peserta Didik/Warga Belajar		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PAUD	**30.162**	**28.546**	**58.708**
KB	14.057	13.431	27.488
SPK KB	6	5	11
TK	14.148	13.211	27.359
SPK TK	120	102	222
SPS	1.761	1.743	3.504
TPA	70	54	124
PKBM	**11.704**	**6.740**	**18.444**
SKB	**119**	**70**	**189**
Grand Total	**41.985**	**35.356**	**77.341**



Gambar 3.28 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar

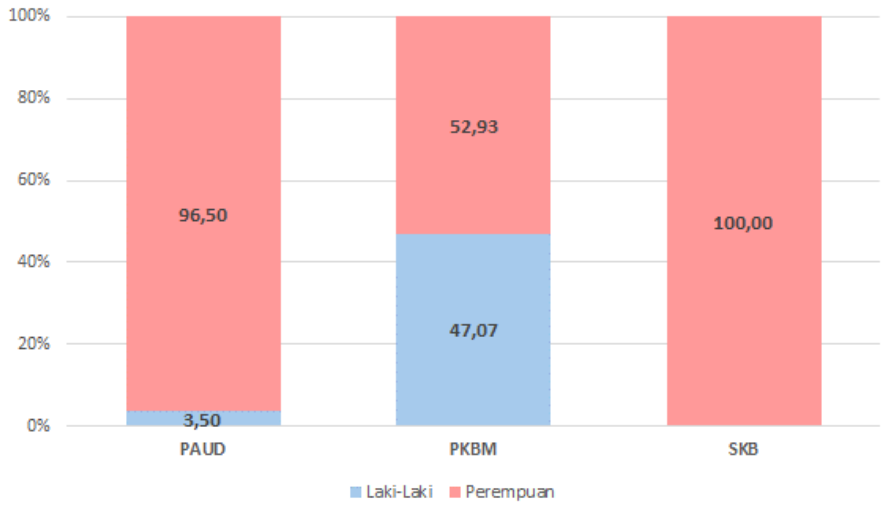
Jumlah peserta didik/warga belajar PAUD di Kabupaten Tangerang yaitu 58.708 orang, dengan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu laki-laki 30.162 (51,38%) dan perempuan 28.546 (48,62%). Kemudian pada PKBM, jumlah warga belajarnya yaitu 18.444 orang, dengan jumlah laki-laki 11.704 (63,46%) dan perempuan 6.740 (36,54%). Sementara pada SKB, terdapat 189 warga belajar dengan 119 (62,96%) diantaranya laki-laki dan 70 (37,04%) orang perempuan.

3. Data Pendidik Nonformal

Pendidik pada Lembaga Pendidikan Nonformal dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda; Guru bagi lembaga PAUD, Tutor bagi lembaga PKBM, dan Pamong bagi SKB.

Tabel 3.27 Pendidik Pendidikan Nonformal

Lembaga	Jumlah Pendidik/Tutor		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PAUD	147	4.054	4.201
KB	85	1.762	1.847
SPK KB	-	6	6
TK	57	2.019	2.076
SPK TK	-	13	13
SPS	5	249	254
TPA	-	5	5
PKBM	**233**	**262**	**495**
SKB	**-**	**6**	**6**
Grand Total	**380**	**4.322**	**4.702**



Gambar 3.29 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal

Pendidik pada pendidikan nonformal berjumlah 4.702 orang dengan 380 diantaranya laki-laki dan mayoritasnya adalah perempuan, yaitu sejumlah 4.322 orang. Pada PAUD, terdapat 4.201 pendidik dengan 147 (3,50%) pendidik laki-laki dan selebihnya yaitu 4.054 (96,50%) pendidik perempuan. Selanjutnya pada PKBM, terdapat 495 pendidik dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama yaitu 233 (47,07%) pendidik laki-laki dan 262 (52,93%) pendidik perempuan. Sementara pada satu SKB, terdapat enam pendidik yang semua pendidiknya berjenis kelamin perempuan.

3.4 Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dapat digambarkan dari peningkatan mutu sekolah/ Lembaga, mutu peserta didik, mutu guru dan mutu sarana prasarana.

1. Peningkatan Mutu Sekolah/ Lembaga

Program peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah antara lain:

a. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM);
b. Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar;
c. Pendampingan Data Pokok Pendidikan;
d. Pendampingan Sekolah Sasaran Akreditasi;
e. Jambore Sanitasi Sekolah; dan
f. Pedampingan Sekolah Model.

2. Peningkatan Mutu Peserta didik

Program peningkatan mutu peserta didik antara lain:

a. Fasilitasi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (O2SN);
b. Penyelenggaraan Minat Bakat dan Kreativitas Peserta didik;
c. Pemberdayaan dan Penilaian Budaya Mutu Sekolah berupa Lomba Bidang Pembelajaran, Perpustakaan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Lomba Olahraga;
d. Sosialisasi Penanaman Pendidikan Anti Korupsi;
e. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
f. Sosialisasi Narkoba bagi peserta didik;

g. Pelatihan Kompetensi Bidang Studi Ekstrakurikuler;
h. Pelatihan kompetensi Peserta didik berprestasi;
i. Pendampingan sekolah model dan rujukan;
j. Pelatihan kompetensi Peserta didik berprestasi;
k. Peningkatan Prestasi Ekstrakulikuler;
l. Beapeserta didik Pendidikan Bagi Peserta didik Berprestasi dan MBR; dan
m. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Peningkatan Mutu Guru

Program peningkatan mutu guru antara lain:

a. Pengembangan Kurikulum;
b. Bedah Standar Kelulusan Sekolah (SKL);
c. Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);
d. Sosialisasi kurikulum SMP dan pengembangan kompetensi pembelajaran dikelas;
e. Pelatihan penyusunan kurikulum 2013;
f. Pedampingan Implementasi Kurikulum 2013;
g. Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
h. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
i. Peningkatan Kompetensi Dan Sertifikasi Calon Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
j. Sosialisasi perundang-undangan bagi Guru Pendidikan dasar;
k. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru; dan
l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan.

4. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana

Program peningkatan mutu sarana prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan berupa:

a. Rehabilitasi ruang kelas;
b. Penambahan ruang kelas baru;
c. Penyediaan mebeulair;
d. Penyediaan alat praktik/ peraga/Media Pembelajaran;
e. Penyediaan Perpustakaan dan Perabotnya;
f. Penyediaan Laboratorium IPA; dan
g. Penyediaan Laboratorium Komputer.

Peningkatan mutu sarana prasarana tersebut bersumber dari Pemerintah pusat, Provinsi, APBD Murni Kabupaten Tangerang dan *stakeholder* lain dalam bentuk program Bantuan Pemerintah, Bantuan Provinsi, Bantuan Sosial, DAK dan/ atau CSR.

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Abdul Hamid Komplek
Perkantoran Pemerintahan
Kabupaten Tangerang Tigaraksa
Kode Pos 15720